



LAPORAN KINERJA

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah mencapai target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, secara substansi Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan penjabaran kinerja dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini disusun untuk bisa menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk menuju masa depan yang lebih baik.
Aamiin.

Banjarbaru, 25 Maret 2019
WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADIMI ADHANI



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Jl. Trikora Gedung Serba Guna Lt.2 Telp/Fax.(0511) 4780069 Banjarbaru

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 25 Maret 2019

Inspektur Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700615 199003 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Banjarbaru berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (results oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 9 Tujuan, 18 Sasaran dan 28 Indikator maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- **Misi I** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja

- ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target) dan 2 indikator sasaran atau 50% kategori baik (mencapai target).

- **Misi II** terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 6 indikator kinerja

- ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target) dan 3 indikator sasaran atau 50% kategori baik (mencapai target).

- **Misi III** terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja

- ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 indikator sasaran atau 85,7% kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 14,28% kategori baik (mencapai target).

- **Misi IV** terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja

- ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran atau 50% kategori baik (mencapai target).

- **Misi V** terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja

- ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 60% kategori baik sekali (melampaui target) dan 2 indikator sasaran atau 40% kategori baik (mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, maka hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 18 sasaran strategis yang mencakup 28 indikator sasaran, diketahui bahwa 17 indikator sasaran atau 60,7% Baik Sekali dan 11 indikator sasaran atau 39,28%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 113,27% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 adalah Baik Sekali.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial di setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap-tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controlable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrolable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada pelaksanaan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diemban. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan sudah seharusnya melaporkan hasilnya baik kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas implementasi rencana dan penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018, Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD tahun ke-3 (Tahun 2018), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden dan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 ASPEK STRATEGIK KOTA BANJARBARU

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822) pada tanggal 20 April 1999.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Secara geografis, Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Luas wilayah Kota Banjarbaru mencapai 371,38 km² yang terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka. Selanjutnya dari 5 Kecamatan terdiri atas 20 Kelurahan. Adapun pembagian luas wilayah kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut :

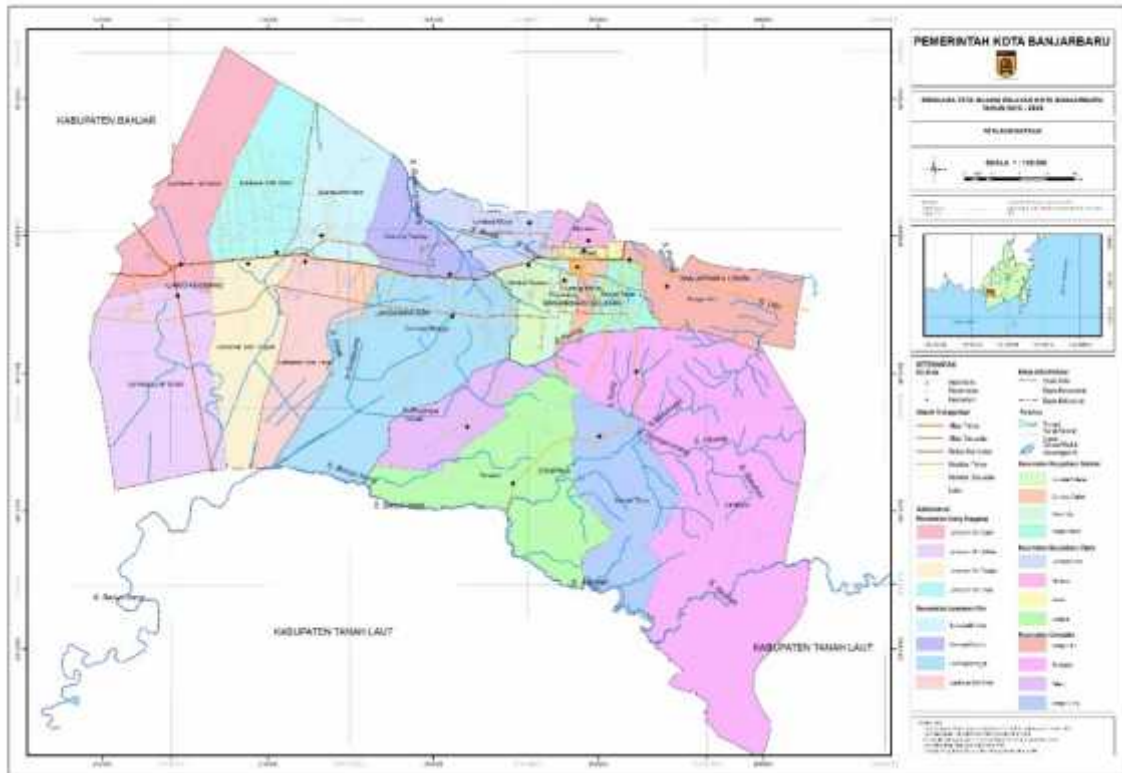
No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km ²)	%
1.	Kecamatan Landasan Ulin	92,42	24,89
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	18,76	
	Kelurahan Guntung Payung	15,25	
	Kelurahan Syamsudin Noor	18,67	
	Kelurahan Guntung Manggis	39,74	
2.	Kecamatan Liang Anggang	85,86	23,12
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	23,86	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	19,50	

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km ²)	%
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	16,15	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	26,35	
3.	Kecamatan Cempaka	146,70	39,50
	Kelurahan Palam	14,75	
	Kelurahan Bangkal	29,80	
	Kelurahan Sungai Tiung	21,50	
	Kelurahan Cempaka	80,65	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara	24,44	6,58
	Kelurahan Loktabat Utara	14,24	
	Kelurahan Mentaos	1,62	
	Kelurahan Komet	2,44	
	Kelurahan Sungai Ulin	6,14	
5.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	21,96	5,91
	Kelurahan Loktabat Selatan	8,58	
	Kelurahan Kemuning	3,61	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,47	
	Kelurahan Sungai Besar	7,30	
Luas Keseluruhan		371,38	100

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka 2018, BPS Kota Banjarbaru

Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Banjarbaru berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian regional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Banjarbaru menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjar dan 6 kabupaten lainnya.
2. Utara-Selatan, menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
3. Menjadi perlintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.



Letak strategis ini menjadi keunggulan komparatif dengan adanya akses terhadap 2 (dua) moda transportasi lain selain darat yaitu akses ke Pelabuhan Laut Trisakti dan Bandar Udara Syamsuddin Noor. Selain itu Kota Banjarbaru juga didukung infrastruktur yang memadai sehingga menjadi daya tarik dan menjadi tujuan para migran untuk bermukim, berwirausaha maupun menanamkan modal di Kota Banjarbaru. Hal ini secara ekonomis sangat menguntungkan karena akan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari segi jasa, perdagangan dan sektor lainnya. Selain itu Kota Banjarbaru juga identik sebagai Kota Pendidikan dimana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga berakibat banyak pendatang yang berdomisili untuk menuntut ilmu.

Sejak tahun 2011 Kota Banjarbaru juga menjadi pusat perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati kawasan seluas 500 Hektar dan telah terdapat aktivitas Sekretariat Daerah dan hampir seluruh SKPD provinsi juga mulai terpusat di Banjarbaru. Hal ini dapat memicu pertumbuhan penduduk dan perekonomian.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester II Tahun 2018, Jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018 berjumlah 243.928 jiwa yang terdiri dari 127.541 jiwa penduduk laki-laki dan 116.387 jiwa penduduk perempuan, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 68.169 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 33.056 jiwa.

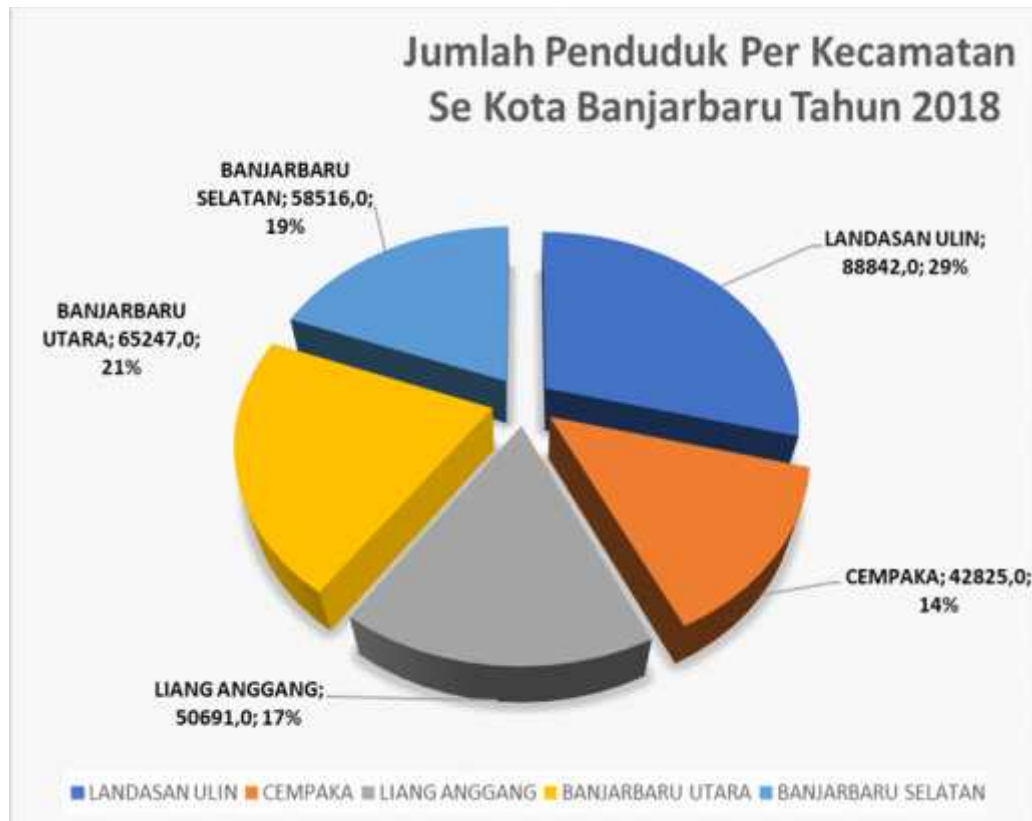
Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banjarbaru, terutama dipengaruhi oleh arus migrasi masuk penduduk dari daerah sekitarnya maupun dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 menurut jenis kelamin dan kepala keluarga Per Kelurahan / Kecamatan di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut ini :

Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah
LANDASAN ULIN				68,169
Landasan Ulin Timur	8,623	8,350	5,172	16,973
Guntung Payung	3,890	3,712	2,324	7,602
Guntung Manggis	14,360	13,935	8,535	28,295
Syamsudin Noor	7,745	7,554	4,642	15,299
CEMPAKA				33,056
Palam	2,275	2,233	1,378	4,508
Bangkal	2,397	2,311	1,394	4,708
Sungai Tiung	4,519	4,310	2,691	8,829
Cempaka	7,475	7,536	4,486	15,011
LIANG ANGGANG				39,112
Landasan Ulin Tengah	3,223	3,087	1,913	6,310
Landasan Ulin Utara	3,959	3,872	2,284	7,831
Landasan Ulin Barat	9,676	9,415	5,648	19,091
Landasan Ulin Selatan	2,995	2,885	1,734	5,880
BANJARBARU UTARA				58,915
Loktabat Utara	19,890	10,884	6,652	30,774
Mentaos	4,729	4,769	2,897	9,498
Komet	1,665	1,737	1,144	3,402
Sungai Ulin	7,638	7,603	4,639	15,241
BANJARBARU SELATAN				44,676
Loktabat Selatan	8,634	8,580	5,321	17,214
Kemuning	4,759	4,542	2,861	9,301
Guntung Paikat	4,864	4,860	3,028	9,724

Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah
Sungai Besar	4,225	4,212	2,630	8,437
JUMLAH	127,541	116,387	71,373	243,928
KEPADATAN PENDUDUK				
SEX RATIO				

Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018

Persentase Sebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018



Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Di Kota Banjarbaru kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarbaru Utara dengan kepadatan sebesar 2.411 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Cempaka dengan kepadatan sebesar 385 jiwa/km². Data kepadatan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2018

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi bagi daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi juga harus diimbangi dengan penyediaan pelayanan dasar yang memadai.

Potensi pertumbuhan penduduk tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung pelaksanaan program dalam pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kota Banjarbaru. Besarnya jumlah penduduk Kota Banjarbaru merupakan potensi sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga kerja. Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat bersaing tinggi.

Selain berpotensi dalam tenaga kerja, jumlah penduduk juga berpengaruh pada meningkatnya hunian baru. Pemerintah Kota

Banjarbaru konsisten dalam penerapan tata ruang dan didukung dengan kesadaran para pengembang perumahan dalam perizinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri dan barang modal, berkembangnya infrastruktur dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kota Banjarbaru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 6,97 %, meningkat apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang mencapai 6,65 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	6,59
2014	6,68
2015*	6,91
2016**	6,95
2017***	6,97

Sumber : BPS Kota Banjarbaru 2018

*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara ***Angka Perkiraan

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru yang semakin berkembang pesat juga disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan penduduk. Disamping itu perpindahan pusat pemerintahan memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan di wilayah Kota Banjarbaru. Selama lima tahun terakhir pembangunan perumahan, hotel berbintang,

tempat hiburan, dan tempat perbelanjaan modern di Kota Banjarbaru semakin pesat.

1.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2018 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2018 mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD serta berdasarkan isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2018, maka prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2018 diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
3. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota
4. Peningkatan koordinasi dan penegakan penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup
5. Peningkatan ketersediaan RTH dan ruang publik
6. Peningkatan pengelolaan sampah
7. Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
9. Peningkatan daya saing produk UMKM dan pemasaran
10. Peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan dan peternakan
11. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi
13. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2018 tersebut adalah merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, pada tanggal 20 April 1999. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Banjarbaru sampai saat ini telah melakukan reorganisasi perangkat daerah dengan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan.

Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarbaru terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 7 (tujuh) Badan, 17 (tujuh belas) Dinas, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Selengkapny Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / KECAMATAN / KELURAHAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Tata Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Bagian Pemerintahan 1.2 Bagian Kerjasama dan Keagrarian 1.3 Bagian Hukum 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Bagian Perekonomian dan Pembangunan 2.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Administrasi Umum <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Bagian Umum 3.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 3.3 Bagian Organisasi 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
2.	SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum b. Bagian Persidangan dan Risalah c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	INSPEKTORAT
5.	BADAN DAERAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / KECAMATAN / KELURAHAN
6.	DINAS DAERAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4. Dinas Perumahan dan Permukiman 5. Dinas Sosial 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 10. Dinas Perdagangan 11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 14. Dinas Lingkungan Hidup 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 17. Rumah Sakit Daerah
7.	KECAMATAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Banjarbaru Utara 2. Kecamatan Banjarbaru Selatan 3. Kecamatan Cempaka 4. Kecamatan Landasan Ulin 5. Kecamatan Liang Anggang
8.	KELURAHAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Loktabat Utara 2. Kelurahan Sungai Ulin 3. Kelurahan Komet 4. Kelurahan Mentaos 5. Kelurahan Loktabat Selatan 6. Kelurahan Kemuning 7. Kelurahan Guntung Paikat 8. Kelurahan Sungai Besar 9. Kelurahan Cempaka

NO	SEKRETARIAT / BADAN / DINAS / KECAMATAN / KELURAHAN
	10. Kelurahan Sungai Tiung 11. Kelurahan Bangkal 12. Kelurahan Palam 13. Kelurahan Landasan Ulin Barat 14. Kelurahan Landasan Ulin Tengah 15. Kelurahan Landasan Ulin Utara 16. Kelurahan Landasan Ulin Selatan 17. Kelurahan Landasan Ulin Timur 18. Kelurahan Syamsuddin Noor 19. Kelurahan Guntung Payung 20. Kelurahan Guntung Manggis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses terpenting dan langkah awal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh instansi pemerintah karena merupakan proses dalam penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANJARBARU TAHUN 2016-2021

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkanlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35).

2.2 VISI DAN MISI KOTA BANJARBARU

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki Banjarbaru, maka Visi Pembangunan Kota Banjarbaru untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 adalah :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat/ SDM yang Berkualitas.
2. Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah.
3. Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari Serta Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Ruang.
4. Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik.

Selaras dengan Visi RPJP Tahun 2005-2025 dan berdasarkan hasil analisa isu-isu strategis, kapasitas internal kelembagaan pemerintah kota, potensi dan aspirasi penduduk ditetapkanlah Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, yaitu :

“ TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER, terdiri atas dua aspek penting yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup :

- 1) Hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih;
- 2) Hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik;
- 3) Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun; dan
- 4) Dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia			
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1 Terwujudnya metode pendidikan yang menyelaraskan pengetahuan dan akhlak	Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter	1. Penyusunan instrumen pendidikan yang berkarakter
			2. Menyisipkan waktu untuk penyampaian pendidikan yang berkarakter
			3. Menyelenggarakan pelatihan pendidikan berkarakter
	1.2 Terwujudnya lulusan yang berkualitas	Peningkatan hasil ujian akhir	1. Peningkatan proses belajar mengajar
			2. Pemberlakuan jam belajar siswa
			3. Penyelenggaraan try out

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatnya pelayanan pasien miskin	Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan	1. Penambahan tempat tidur pasien miskin
			1. Sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan
	1.2 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan	1. Peningkatan SDM tenaga kesehatan
			2. Sosialisasi kesehatan bagi ibu dan anak
Misi 2 : Meningkatkan Penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan			
1. Meningkatkan sistem drainase perkotaan yang baik dan terkoneksi	1.1 Meningkatkan sistem pengelolaan drainase	Pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat	1. Identifikasi kebutuhan jalan, jembatan dan drainase
			2. Merencanakan dan pembangunan jalan, jembatan dan drainase
2. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni	2.1 Berkurangnya luasan permukiman kumuh	Penurunan kawasan kumuh melalui penanganan berbasis masyarakat	1. Identifikasi kawasan kumuh
			2. Merencanakan dan menangani kawasan kumuh
	2.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Peningkatan kualitas rumah dengan pemberian bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni	1. Identifikasi rumah tidak layak huni
			2. Merencanakan dan menangani rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan Akses terhadap Sanitasi dan Air Bersih	3.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman	Peningkatan kerjasama dengan PDAM	1. PIPANISASI dan penyertaan modal
			2. Pengadaan air minum di daerah rawan air
	3.2 Meningkatnya akses terhadap pengelolaan air limbah yang memenuhi standar	Peningkatan penyediaan program dan sarana air limbah yang banyak	1. Pembangunan dan operasional IP2T dan truk tinja
			2. Penuntasan BABS
4. Meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan	4.1 Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan	Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sampah	1. Pembangunan dan operasional TPS3R dan Bank sampah
			2. Pengurangan sampah dari sumbernya
	4.2 Meningkatnya Kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan udara, tanah dan air (pengurangan pencemaran udara, tanah dan air	1. Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan polutan
			2. Penegakan hukum lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Meningkatkan pemenuhan RTH	5.1 Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik berbasis masyarakat dan kerjasama swasta	1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun dan boleh dibangun 2. Pembangunan taman kota
6. Meningkatnya konektivitas antar perangkat daerah	6.1 Meningkatkan sarana prasarana Teknologi Informasi	Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi 2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini
Misi 3 : Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan			
1. Meningkatkan kemandirian fiskal kota	1.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	1. Identifikasi sumber PAD 2. Meningkatkan pelayanan pembayaran PAD melalui perbankan
2. Meningkatkan investasi	2.1 Meningkatnya jumlah penanaman modal	Peningkatan investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan dan kerjasama dengan swasta	1. Menyusun peluang investasi 2. Memasarkan peluang investasi
3. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat	3.1 Meningkatnya pasar tradisional yang dikelola secara modern	Pembangunan pasar tradisional melalui kerjasama dengan swasta	1. Penyediaan lahan 2. Meningkatkan komunikasi dengan swasta
	3.2 Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Peningkatan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan	1. Identifikasi peluang kewirausahaan 2. Mengadakan pelatihan kewirausahaan
Misi 4 : Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi			
1. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan SDM penyusun Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Melaksanakan bimbingan teknis SDM penyusun Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	1.2 Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan SDM pengelolaan keuangan	Melaksanakan bimbingan teknis SDM pengelolaan keuangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1.3 Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah melalui peningkatan SDM	Melaksanakan bimbingan teknis SDM pengawas
	1.4 Meningkatkan pelayanan public	Peningkatan pelayanan perijinan melalui peningkatan SDM dan SOP	1.Melaksanakan bimbingan teknis SDM perijinan
			2.Penyederhanaan SOP
Misi 5 : Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib			
1.Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat	1.1 Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	Peningkatan kerjasama dengan lembaga sosial	1.Pemetaan masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial
			2.Identifikasi kebutuhan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.
	1.2 Menurunnya Beban Masyarakat Miskin	Peningkatan penerima Raskin dan percepatan pelayanan santunan kematian	1.Meningkatkan subsidi
2.Menyusun regulasi			

Prioritas daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 diselaraskan dengan program dari SKPD serta berdasarkan isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi, maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah agar Pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 tahun ke depan fokus yaitu :

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang dapat lebih terarah dan lebih Berkualitas
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman

Setiap tahun anggaran perlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi masalah yang ada setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2018 sebagaimana berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (RKPD)
1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang berkarakter 2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur kota 2. Peningkatan ketersediaan RTH dan ruang publik 3. Peningkatan koordinasi dan penegakan penyelenggaraan penataan bangunan dan gedung 4. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni 5. Peningkatan pengelolaan sampah 6. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pelajar 7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi	1. Peningkatan daya saing produk UMKM dan pemasaran 2. Peningkatan investasi daerah 3. Peningkatan ketahanan pangan 4. Peningkatan sarana prasarana perekonomian
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	1. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan penanggulangan masalah sosial

Berdasarkan prioritas tahun 2018 tersebut di atas, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu ***“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”***.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikator kinerjanya serta target capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1.	Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan yang berkarakter	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase kelulusan: - SD - SMP	100% 100%	
			Angka Melanjutkan : - SD ke SMP - SMP ke SMA	99,97% 88,50%	
			Angka Pendidikan yang Ditamatkan : - SD - SMP	17,83% 6,78%	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 	Persentase integrasi Jamkesda ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	75%	Dinas Kesehatan
			Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (‰)	100,25	
			Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (‰)	5,57	
2.	Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan 	Presentase Berkurangnya luas Permukiman kumuh	0,22%	Dinas Perumahan & Permukiman
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,09%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Fasilitas Umum 	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan Drainase skala kota	47,51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai ketentuan	10,196%	
		Program Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	83,17%	
		Program Penyediaan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90,95%	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah dari sumbernya	10%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sampah terangkut dan diproses ke TPA	88%	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi 	Indeks pencemaran air	41	
			Indeks pencemaran udara	Sedang	
3.	Banjarbaru daerah tujuan investasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 	Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar)	1.496	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar)	59	
		<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 	Prosentase kecamatan yang memiliki pasar tradisional	60%	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase wirausaha dengan pertumbuhan usaha positif	83%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4.	Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	Bagian Organisasi-Setdako
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini pemeriksaan Eksternal	WTP	<ul style="list-style-type: none"> BPPRD BPKAD

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		• Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Berkembang	Inspektorat
		• Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	B	Lintas SKPD
			Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Hijau	Lintas SKPD
		• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pelayanan	60%	Dinas Kominfo
5.	Banjarbaru aman, tertib dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program Pembinaan Panti Asuhan, Panti Jompo, SLB dan Pondok Pesantren • Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 	Cakupan penanganan PMKS	41,4%	Dinas Sosial

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan perubahan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia					
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia	1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1.1	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
		1.1.2	Meningkatkan minat baca masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan minat baca masyarakat
		1.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah	1.1.3.1	Peningkatan kualitas dan akses sumberdaya lingkungan hidup sekolah
		1.1.4	Meningkatkan kompetensi pendidik	1.1.4.1	Pengembangan kapasitas guru

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBI JAKAN	
				1.1.4.2	Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran
		1.1.5	Mewujudkan sarana angkutan yang aman dan nyaman	1.1.5.1	Penyediaan sarana angkutan pelajar gratis
	1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.2.1	Meningkatkan kesehatan masyarakat	1.2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
				1.2.1.2	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
				1.2.1.3	Peningkatan standar pelayanan kesehatan
				1.2.1.4	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
		1.2.2	Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	1.2.2.1	Peningkatan pelayanan akses air minum yang aman
				1.2.2.2	Peningkatan pelayanan sistem air limbah yang memadai
		1.2.3	Mewujudkan keluarga berencana berwawasan KKBPK	1.2.3.1	Peningkatan kapasitas peserta keluarga berencana
		1.2.4	Meningkatkan event olahraga masyarakat	1.2.4.1	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Misi 2 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan					
2. Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan	2.1 Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah	2.1.1	Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	2.1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kapasitas, kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
		2.1.2	Meningkatkan fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berkualitas	2.1.2.1	Peningkatan sarana dan fasilitas jalan
	2.2 Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir	2.1.3	Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan	2.1.3.1	Mengembangkan dan meningkat kan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	3.1.1	Menurunkan luas kawasan permukiman kumuh	3.1.1.1	Peningkatan penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan ruang publik yang layak
		3.1.2	Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	3.1.2.1	Peningkatan rumah tidak layak huni dengan pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni
	3.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.2.1	Menjaga kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan	3.2.1.1	Peningkatan kualitas air
				3.2.1.2	Menjaga kualitas udara
		3.2.2	Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah	3.2.2.1	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan sampah
	3.2.3	Meningkatkan pengelolaan sampah secara 3R	3.2.3.1	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan sampah secara 3R	
	3.3 Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	3.3.1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Publik	3.3.1.1	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik
		3.3.2	Meningkatkan kualitas taman	3.3.2.1	Peningkatan taman kota
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang Kewirausahaan					
4. Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah	4.1 Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	4.1.1	Meningkatkan jumlah wirausahawan baru	4.1.1.1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha baru
		4.1.2	Mengembangkan IKM	4.1.2.1	Peningkatan kapasitas IKM
		4.1.3	Meningatkan kunjungan wisatawan ke Kota Banjarbaru	4.1.3.1	Pengembangan destinasi pariwisata, dan kegiatan seni budaya
		4.1.4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing	4.1.4.1	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		4.1.5	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	4.1.5.1	Peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja
	4.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.2.1	Meningkatkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah	4.2.1.1	Peningkatan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah
	4.3 Meningkatnya Investasi	4.3.1	Meningkatkan persentase penanaman modal	4.3.1.1	Peningkatan pelayanan perijinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4.3.1.2 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	4.4 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	4.4.1 Meningkatkan tata kelola pasar	4.4.1.1 Pembangunan Pasar Tradisional Yang Dikelola Secara Modern
	4.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	4.5.1 Menjaga ketersediaan pangan	4.5.1.1 Penyediaan cadangan pangan
		4.5.2 Meningkatkan produksi pangan	4.5.2.1 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		4.5.3 Menjaga stabilitas harga barang pokok	4.5.3.1 Menjaga stabilitas harga barang pokok
		4.5.4 Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian	4.5.4.1 Pengembangan sarana prasarana pertanian
	Misi 4 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi		
5. Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	5.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	5.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	5.1.1.1 Peningkatan kapasitas SDM penyusun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		5.1.2 Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	5.1.2.1 Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan
		5.1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	5.1.3.1 Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
		5.1.4 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5.1.4.1 Peningkatan kapasitas SDM pengawas
		5.1.5 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja	5.1.5.1 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja pengelolaan keuangan
		5.1.6 Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	5.1.6.1 Peningkatan pengelolaan keuangan
		5.1.7 Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai dengan perundang-undangan	5.1.7.1 Peningkatan pengelolaan aset daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		5.1.8	Menurunkan temuan hasil pemeriksaan BPK	5.1.8.1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
		5.1.9	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan serta kualitas layanan publik	5.1.9.1	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
		5.1.10	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP)	5.1.10.1	Peningkatan kualitas SDM pengawasan
	5.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	5.2.1.1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perijinan
		5.2.2	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu	5.2.2.1	Penyederhanaan standar operasional prosedur (SOP) perijinan
		5.2.3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas	5.2.3.1	Penyederhanaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan
	5.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	5.3.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	5.3.1.1	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		5.3.2	Mewujudkan akses dan kualitas layanan informasi publik	5.3.2.1	Peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik
	Misi 5 : Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib				
	6. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	6.1 Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum, dan Ketertiban Masyarakat	6.1.1	Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda/perkada	6.1.1.1 Peningkatan kapasitas SDM perlindungan masyarakat (Linmas)
			6.1.2	Meningkatkan ketentraman masyarakat	6.1.2.1 Peningkatan sarana prasarana perlindungan masyarakat (Linmas)
			6.1.3	Menjaga keamanan dan stabilitas daerah	6.1.3.1 Pengembangan wawasan kebangsaan
		6.2 Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	6.2.1	Meningkatkan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran	6.2.1.1 Peningkatan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
			6.2.2	Meningkatkan pelayanan tanggap darurat yang cepat dan tepat	6.2.2.1 Peningkatan Kapasitas SDM penanggulangan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
7. Meningkatkan Perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat	7.1 Meningkatnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu	7.1.1	Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin	7.1.1.1	Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
		7.1.2	Meningkatkan pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan	7.1.2.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Banjarbaru diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru. Target pencapaian ini adalah indikator kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah disajikan sebagaimana berikut ini :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Th	10,74	10,75	10,76	10,77	10,78	10,80	10,85
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Th	14,75	14,77	14,78	14,79	14,80	14,85	14,90
3.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka	100,32	100,30	100,29	100,15	100,00	99,00	98,00
4.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka	5,62	5,60	5,59	5,50	5,40	5,30	5,20
5.	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	93,68	95,33	96,70	97,39	98,20	99,09	100,00
6.	Persentase berkurangnya Kawasan rawan banjir	%	80,00	75,00	65,00	50,00	35,00	10,00	0,00

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Persentase Kawasan perkotaan bebas kumuh	%	99,01	99,01	99,11	99,22	99,33	99,44	99,55
8.	Persentase Rumah Layak Huni	%	N/A	99,50	99,53	99,58	99,63	99,68	99,73
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	N/A	67,56	66,23	66,39	66,75	67,11	67,47
10.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	10,17	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28	10,30
11.	Persentase wirausaha baru	%	N/A	7,05	14,10	19,04	23,97	28,91	33,85
12.	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	55.000	60.000	66.000	76.800	87.600	98.400	120.000
13.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,22	6,29	6,20	6,15	6,10	6,05	5,95
14.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	Rp.	140,40	165,00	175,00	188,60	202,20	223,70	245,10
15.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp. Milyar)	Rp.	370,00	790,60	1162,60	1556,60	1983,60	2453,60	2976,60
16.	Persentase Pasar Tradisional yang dikelola secara modern	%	40,00	40,00	40,00	40,00	60,00	60,00	80,00
17.	Ketersediaan Pangan Daerah	Skor PPH	76,00	78,00	80,09	81,00	83,50	85,00	88,00
18.	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	A
19.	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
20.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	N/A	2,40	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
23.	Indeks SPBE	Nilai	N/A	N/A	1,38	1,80	2,30	2,50	2,75
24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	%	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
25.	Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
26.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	N/A	80,00	82,00	85,00	88,00	92,00	95,00
27.	Cakupan penanganan PMKS	%	36,40	41,00	50,00	59,00	64,00	64,00	68,00
28.	Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu	%	56,74	56,74	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018

Laporan Kinerja 2018 ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen **Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2016-2021 pada Oktober Tahun 2018**. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pencapaian sasaran strategis diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang memuat 5 (lima) Misi,

7 (tujuh) Tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran, dengan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran:

- Misi I terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja
- Misi II terdiri dari 2 tujuan, 5 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja
- Misi III terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja
- Misi IV terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja
- Misi V terdiri dari 2 tujuan, 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja.

No.	Misi	Jumlah tujuan	Jumlah sasaran strategis	Jumlah indikator kinerja sasaran	Pencapaian indikator sasaran
1	Misi 1	1	2	4	BS = 2 , B = 2
2	Misi 2	2	5	6	BS = 3 , B = 3
3	Misi 3	1	5	7	BS = 6 , B = 1
4	Misi 4	1	3	6	BS = 3, B= 3
5	Misi 5	2	3	5	BS = 3, B = 2
Jumlah		7	18	28	BS = 17, B = 11

Dari 18 (delapan belas) sasaran, dengan 28 (dua puluh delapan) kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru adalah :

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi 1 (4 indikator sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	50%
2	Baik (B)	2	50%
3	Cukup (C)	-	-

4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		4	
Misi 2 (6 indikator sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	3	50%
2	Baik (B)	3	50%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		6	
Misi 3 (7 indikator sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	6	85,7%
2	Baik (B)	1	14,28%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		7	
Misi 4 (6 indikator sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	3	50%
2	Baik (B)	3	50%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		6	
Misi 5 (5 indikator sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	3	60%
2	Baik (B)	2	40%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		5	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 18 sasaran strategis yang mencakup 28 indikator sasaran, diketahui bahwa **17 indikator sasaran atau 60,7% Baik Sekali dan 11 indikator sasaran atau 39,28 % Baik.**

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Capaian kinerja 18 (delapan belas) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran disajikan dalam analisis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA (%)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia							
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,77	10,77	100
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,91	14,78	99,93
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	100,15	79,00	126,77
		4.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	5,50	2,00	275,00
Misi 2 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan							
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah	5.	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	97,39	96,12	98,69
4.	Meningkatnya Penanganan Kawasan Rawan Banjir	6.	Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan banjir	%	50,00	50	100

5.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	7.	Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh	%	99,22	99,53	100,31
		8.	Persentase Rumah Layak Huni	%	99,58	99,53	99,95
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,39	67,73	102
7.	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	10.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	10,26	10,43	101,65

Misi 3 :

Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan

8.	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	11.	Persentase wirausaha baru	%	19,04	19,31	101,42
		12.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	76.800	99,973	130
		13.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,15	5,53	110,08
9.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)	%	188,60	228,53	121,17
10.	Meningkatnya Investasi	15.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp. Miliar)	Rp.	1.556,60	1.630,45	104,74
11.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	16.	Persentase Pasar Tradisional Yang Dikelola Secara Modern	%	40	40	100

12.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	17.	Ketersediaan Pangan Daerah	Skor PPH	81,00	81,93	102,29
-----	--------------------------------------	-----	----------------------------	----------	-------	-------	--------

Misi 4 :

Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	18.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B (63,28)	100
		19.	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi (3,05)	101
		20.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		21.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,05	3,06	100,3
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Sangat baik	Sangat Baik (82,45)	100
15.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	23.	Indeks SPBE	%	1,80	2,30	127,77

Misi 5 :

Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman dan Tertib

16.	Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	70	90	128,5
		25.	Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0	0	100

17.	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	26.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	85	85	100
18.	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu	27.	Cakupan Penanganan PMKS	%	59	91	154,24
		28.	Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu	%	60,03	60,52	100,82

Berikut ini disajikan analisis pencapaian seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018:

1.	SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
----	--

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal pada suatu daerah, tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat diukur dari 2 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,76	10,76	10,77	10,77	100	10,85	8,80
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,84	14,84	14,79	14,78	99,93	14,90	-
Rata-Rata Capaian Kinerja							99,97%		

Realisasi Indikator sasaran “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 10,77 tercapai 100% dengan kategori Baik sedangkan Realisasi Indikator Sasaran “Angka Harapan Lama Sekolah” ditargetkan sebesar 14,79 tercapai 99,93% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 99,97% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2018 adalah 10,77 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar

10,76 terjadi penurunan sebesar 0,01 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2018 adalah 14,78 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 14,84 terjadi penurunan sebesar 0,06.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2018 adalah 10,77 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 10,85 masih tersisa 0,08 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2018 adalah 14,78 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 14,90 masih tersisa 0,12.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2018 adalah 10,77 namun dibandingkan dengan RPJMN tahun 2021 sebesar 8,80 sudah melebihi target yang ditentukan.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

- a. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru secara berkesinambungan, efektif-efisien dan bersinerji diantara beberapa SKPD lain lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru serta instansi vertikal lainnya di antaranya :
 1. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, yang secara periodik melakukan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan SMP se Kota Banjarbaru, dan pembinaan sekolah sehat untuk jenjang TK, SD dan SMP
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarrbaru terkait pembinaan lingkungan sekolah agar dikelola dengan baik hingga memperoleh Adiwiyata
 3. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terkait angkutan gratis bagi siswa di Kota Banjarbaru.

4. BNN Kota Banjarbaru terkait pembinaan siswa SD dan SMP agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya
 5. Kapolres Kota Banjarbaru terkait pembinaan siswa SD dan SMP agar terhindar masalah kriminal
 6. Kementerian Agama Kota Banjarbaru bersama-sama berupaya menuntaskan program belajar sembilan tahun dan berusaha menekan angka putus sekolah seminimal mungkin.
 7. Lembaga Penjaminan dan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan terkait pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih profesional dan kompetitif.
- b. Adanya perbaikan yang terus menerus sarana prasarana pendidikan (rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi dan jamban sekolah) dari jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di seluruh Kota Banjarbaru.
 - c. Upaya memenuhi fasilitas pendidikan lainnya seperti mebelur sekolah, multimedia, buku perpustakaan dan komputer untuk menunjang kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur pelayanan Bidang Pendidikan, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kebijakan pendidikan masih dirasakan kurang, dengan jumlah sumberdaya aparatur sebanyak 136 orang, Namun dalam hal ini sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang pendidikan masing-masing program pada tahun 2018 efektif dan efisien hal ini terlihat dari realisasi 5 (lima) program yang dilaksanakan bidang pendidikan rata-rata efisien sebesar 8,7%. Kedepannya dirasakan perlu

penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal terhadap dunia pendidikan di kota Banjarbaru.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
2. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3. Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
4. Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah
5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
7. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
2. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SD
3. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Bina SD
4. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Bina SD
5. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Bina SMP
6. Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SD
7. Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Bina SMP
8. Kegiatan Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SD
9. Kegiatan Penyelenggaraan Siswa Baru dan Ujian Bina SMP
10. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah Bina SD
11. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP

12. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
 13. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs
 14. Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Bina SD
 15. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SD
 16. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Bina SMP
 17. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SD
 18. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bina SMP
 19. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Bina SMP
 20. Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI (DAK)
 21. Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs (DAK)
 22. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Bina SMP
 23. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SD
 24. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Bina SMP
 25. Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah Bina SMP
 26. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD
 27. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP
 28. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bina SMP
 29. Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah Bina SD
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
1. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 2. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bina SMP

4. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 5. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina PAUD dan Dikmas
 6. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SD
 7. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan PTK Bina SMP
- d. Program Pendidikan Non Formal
1. Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
 2. Kegiatan Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan
 3. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
 4. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
 5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 6. Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD
 7. Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
 8. Kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMU
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
 3. Kegiatan Penyusunan Data Pokok Sekolah
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba/ Pemilihan PTK Berprestasi
 5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan Binas SD
 6. Kegiatan Pengembangan Sekolah Berbasis karakter Bina SD
 7. Kegiatan Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.69.292.521.409 telah direalisasi Rp.59.524.911.184,19 sebesar atau 91,08% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.128.060.100	1.988.995.700	93,46
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	48.350.673.759	39.854.653.134,19	82,43
3	Program Pendidikan Non Formal	1.030.844.850	998.193.350	96,83
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	15.721.110.500	14.866.048.850	94,56
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.061.832.200	1.817.020.150	88,13
Jumlah		Rp.69.292.521.409	Rp.59.524.911.184,19	91,08

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Pembebasan biaya operasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
2. Peningkatan aksesibilitas, melalui pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, serta memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam menjaring anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.
3. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional.
5. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian tambahan penghasilan.

2. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan tolak ukur derajat kesehatan masyarakat dimana makin rendah angka kematian ibu melahirkan dan makin rendahnya bayi lahir mati menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik, disamping juga rendahnya angka kesakitan akibat penyakit menular. Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Penilaian terhadap indikator kinerja Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup diperhitungkan dengan jumlah ibu meninggal saat melahirkan (sampai 42 hari masa nifas) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup diperhitungkan dengan bayi meninggal saat proses kelahiran sampai dengan 11 bulan dibagi kelahiran hidup dalam 1 tahun dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Menurut data Fasilitas Kesehatan Tingkat I (Puskesmas) di Kota Banjarbaru untuk Tahun 2018 jumlah kelahiran bayi sebanyak 5.094 dimana kematian ibu berjumlah 4 orang, dan kematian bayi terdapat 10 orang.

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu		Jumlah Kematian Bayi	
		2017	2018	2017	2018
1.	Cempaka	0	1	2	2
2.	Banjarbaru Selatan	0	0	3	3
3.	Banjarbaru Utara	1	0	5	2
4.	Liang Anggang	0	1	4	2
5.	Landasan Ulin	4	2	4	1
Jumlah		5	4	18	10

Pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dari 2 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka	100,29	100,29	100,15	79,00	126,77	98,00	306
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka	5,59	5,59	5,50	2,00	275,00	5,20	24
Rata-Rata Capaian Kinerja							200,88%		

Realisasi Indikator sasaran “Angka Kematian Ibu (AKI)” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,15 terealisasi 126,77% dengan kategori Baik Sekali sedangkan Realisasi Indikator Sasaran “Angka Kematian Bayi (AKB)” ditargetkan sebesar 5,50 terealisasi 275,00% dengan kategori Baik Sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 telah tercapai 200,88% dengan kategori Baik Sekali .

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Angka Kematian Ibu (AKI)” tahun 2018 adalah 79,00 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 100,29 terjadi penurunan sebesar 21,29 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Angka Kematian Bayi (AKB)” tahun 2018 adalah 2,00 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,59 terjadi penurunan sebesar 3,59.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Angka Kematian Ibu (AKI)” tahun 2018 adalah 79,00 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 98,00 masih tersisa 19,00 atau tercapai 80,61% sedangkan Realisasi kinerja indikator “Angka Kematian Bayi (AKB)” tahun 2018 adalah 2,00 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 5,20 masih tersisa 3,20 atau tercapai 38,46% .

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Jika dibandingkan dengan target Nasional realisasi kinerja penurunan AKI dan AKB di kota Banjarbaru sudah dapat dikategorikan sangat baik, dimana target Nasional untuk AKI adalah dibawah 306/100.000KH dan untuk AKB adalah dibawah 24/1.000KH. Untuk kota Banjarbaru pada tahun 2018 sudah bisa mencapai 79/100.000KH untuk AKI dan 2/1.000KH untuk AKB.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia

Mencermati dan memperhatikan kemampuan sumber daya aparatur yang ada pada Bidang Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan konflik, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak sudah sesuai standar.

b. Sumber Daya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk penurunan AKI dan AKB pada tahun anggran 2018 ini sudah cukup namun masih dirasakan perlu penambahan dan pembenahan sesuai penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB
 - Kegiatan Jaminan Persalinan
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.853.629.250 telah direalisasi Rp.742.874.850 sebesar atau 91,08% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.853.629.250	742.874.850	68,74
JUMLAH		Rp 1.853.629.250	Rp.742.874.850	68,74

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melaksanakan Bimbingan teknis tenaga kesehatan
2. Melakukan Standarisasi SDM kesehatan melalui akreditasi dan registrasi tenaga kesehatan
3. Meningkatkan Penyuluhan bidang kesehatan terutama terhadap ibu hamil dan menyusui
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi
5. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal /AMP yaitu kegiatan audit kematian Ibu dan Bayi serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian
6. Melaksanakan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi setiap Bidan
7. Melakukan Pertolongan di seluruh Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8. Meningkatkan Kualitas kunjungan Ibu Hamil 4 kl (K4)
9. Melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK)
10. Meningkatkan Penggunaan ASI Eksklusif (pemberian Sertifikat ASI Eksklusif)

3. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah

Indikator Persentase Konektivitas antar Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kota sangat erat kaitannya dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Permen PU Nomor:01/PRT/M/2014), yang mengatur ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi urusan wajib daerah serta berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Adapun pengukurannya dilakukan dengan mendata Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (data pada RT dan RW) yang telah terhubung oleh jaringan jalan, sehingga bisa dilakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan jika masih ada yang belum menghubungkan dengan jaringan jalan.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan total panjang jalan di Kota yaitu 555,3 km (SK Nomor:188.45/470/KUM/2016 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan dan Kelas Jalan Kota di Kota Banjarbaru). Dalam pelaksanaannya Panjang jalan yang sudah terbangun ialah 529,4 km sehingga target konektivitas jalan baru mencapai 95,52%.

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \left(\frac{(\text{target} - \text{realisasi } n-1) \times \text{capaian}}{100\%} \right) + \text{realisasi } n-1 \\
 &= \left(\frac{(96,12 - 95,52) \times 100}{100\%} \right) + 95,52 \\
 &= 96,12\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Konektivitas Antar Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah kota	%	96,70	96,55	97,39	96,12	98,69	100	100
Capaian Kinerja							98,69%		

Realisasi Indikator sasaran “Persentase Konektivitas Antar Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kota” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 97,39 terealisasi 96,11. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 98,69% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota” tahun 2018 adalah 96,12 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 96,55 terjadi penurunan sebesar 0,43.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota” tahun 2018 adalah 96,12 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100 masih tersisa 3,88.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

indikator “Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota” dikaitkan dengan Target capaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Permen PU Nomor:01/PRT/M/2014) sebesar 100% di akhir Tahun 2019, maka dengan realisasi di Tahun 2018 sebesar 96,12% masih tersisa 3,89.

ANALISIS KEBERHASILAN

Pada tahun 2018 keberhasilan indikator “Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota” sangat didukung oleh masyarakat Kota Banjarbaru dengan menghibahkan tanahnya untuk pelaksanaan pembangunan jalan baru.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wilayah kerjanya untuk menunjang Program Pembangunan Jalan diperlukan 5 orang yaitu 1 kbid, 1 kasi, dan 3 orang staff. Sedangkan pada kondisi sekarang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk program pembangunan jalan terdiri dari 4 orang yaitu 1 kbid, 1 kasi, dan 2 orang staff sehingga efisiensi sebesar 20% untuk melaksanakan program tersebut.

- Sumber Daya Anggaran

Untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp 37.757.909.180 dengan realisasi sebesar Rp 24.875.163.040 sehingga mencapai efisiensi sebesar Rp 12.882.746.140 atau 34,12%.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan Pembangunan Jalan
2. Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK)
3. Kegiatan Pembangunan Jembatan

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah tahun 2018 dari

pagu anggaran sebesar Rp.37.757.909.180 telah direalisasi Rp.24.875.163.040 sebesar atau 65,88% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	37.757.909.180	24.875.163.040	65,88
Jumlah		Rp 37.757.909.180	Rp.24.875.163.040	65,88

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melaksanakan penguatan kualitas SDM teknis dilapangan
2. Melaksanakan Rapat koordinasi secara periodik dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

4. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Penanganan Kawasan Rawan Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda saat musim penghujan tiba. Di wilayah Indonesia sering kali terjadi banjir, dan hal ini pun terjadi di Kota Banjarbaru. Dampak dari adanya banjir sangat luas dan biasanya selalu melanda saat intensitas hujan tinggi.

Kota Banjarbaru sudah melakukan Penentuan jumlah lokasi titik rawan banjir sebanyak 20 titik, yang diperoleh dari data inventarisasi melalui pengukuran dan pengamatan lapangan terhadap kejadian banjir di beberapa tahun belakang. Metode pengerjaan yang dilakukan dinas teknis untuk mengurangi titik rawan banjir dengan cara menyiring sungai.

Dinas teknis yang menangani kawasan rawan banjir yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah menarget penanganan titik rawan banjir Di Kota Banjarbaru dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut :

No	Jumlah Lokasi	Tahun	Target
1	5 Lokasi	2016	25%
2	7 Lokasi	2017	35%
3	10 Lokasi	2018	50%
4	13 Lokasi	2019	65%
5	18 Lokasi	2020	90%
6	20 Lokasi	2021	100%

Lokasi titik rawan banjir Di Kota Banjarbaru

No.	Daerah
1.	Ujung Murung
2.	Basung
3.	Kertak Baru
4.	Guntung Lua Kemuning
5.	Skb - Al-Fajar – Kemuning
6.	Gg. Keluarga – Kemuning

7.	Sukarelawan – Al Manar - Kemuning
8.	Jalan Karet – Kemuning
9.	Liang Anggang – Jembatan 2
10.	Babussalam – Sei. Banyu Irang
11.	Jl. Soeratno - Gt. Payung
12.	Sei Pulantan
13.	Mentaos Ujung – Sei Gotong Royong
14.	Parit Besar – Sei. Banyu Irang
15.	Pumpung Sei Bangkal
16.	Sei Rimba
17.	Sumber Adi – Kemuning
18.	Intan Sari – Kemuning
19.	Sei Besar – Kemuning
20.	Guntung Papuyu

Sumber data : Bidang sumber daya air – Dinas PU dan PR Kota Banjarbaru

Ditahun 2018 sudah terealisasi 10 (sepuluh) titik rawan banjir sebagaimana yang sudah ditargetkan sebagai berikut :

No.	Daerah
1.	Guntung Lua Kemuning
2.	Sukarelawan – Al Manar - Kemuning
3.	Jalan Karet – Kemuning
4.	Jl. Soeratno - Gt. Payung
5.	Mentaos Ujung – Sei Gotong Royong
6.	Sei Rimba
7.	Sumber Adi – Kemuning
8.	Intan Sari – Kemuning
9.	Sei Besar – Kemuning
10.	Guntung Papuyu

Sumber data : Bidang sumber daya air – Dinas PU dan PR Kota Banjarbaru

Pencapaian sasaran meningkatnya penanganan Kawasan rawan banjir diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir	%	65	35	50	50	100	0,00	50
Rata-Rata Capaian Kinerja							100%		

Realisasi Capaian kinerja indikator Persentase penanganan titik rawan banjir Pada Tahun 2018 adalah sebesar 50% Hal ini diperoleh dari perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah lokasi titik rawan banjir yang tertangani}}{\text{jumlah lokasi titik rawan banjir}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{20} \times 100\% \\ &= 50\%\end{aligned}$$

Realisasi Indikator sasaran “Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 50 terealisasi 50. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 100% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir” tahun 2018 adalah 50% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 35% terjadi kenaikan 15%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir” tahun 2018 adalah 50% namun dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0 % masih tersisa 50%.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat Target Nasional pada indikator “Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan Banjir”.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Pada Tahun 2018 tidak memiliki permasalahan yang berarti, di beberapa titik rawan banjir dapat terselesaikan dengan cara penyirangan siring dinding penahan, sehingga seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wilayah kerjanya untuk menunjang Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya diperlukan 7 orang yaitu 1 kabid, 1 kasi, dan 5 orang staff. Sedangkan pada kondisi sekarang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk program pembangunan jalan terdiri dari 6 orang yaitu 1 kabid, 1 kasi, dan 4 orang staff sehingga efisiensi sebesar 14,28% untuk melaksanakan program tersebut.

- Sumber Daya Anggaran

Untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp 12.576.931.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.377.065.100,00 sehingga mencapai efisiensi sebesar Rp.2.199.866.400,00 atau 17,49%.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

1. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - a. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya
 - b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penanganan Kawasan rawan banjir tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.12.576.391.500 telah

direalisasi Rp.10.377.065.100 sebesar atau 82,51% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	12.576.391.500	10.377.065.100	82,51
JUMLAH		Rp.12.576.391.500	Rp.10.377.065.100	82,51

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melaksanakan penguatan kualitas SDM
2. Melaksanakan Rapat koordinasi secara periodik dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan

5. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman

Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh adalah Kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung
- b. jalan lingkungan
- c. penyediaan air minum
- d. drainase lingkungan
- e. pengelolaan air limbah
- f. pengelolaan persampahan
- g. proteksi kebakaran

Dikota Banjarbaru telah dilakukan identifikasi perumahan dan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, sehingga didapatkan luasan permukiman kumuh Kota Banjarbaru Tahun 2018 yaitu sebesar 173,71 Ha (SK Kumuh Kota Banjarbaru Tahun 2018) sedangkan luasan permukiman di Kota Banjarbaru adalah $\pm 18.440,07$ Ha.

Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Layak Huni sangat erat kaitannya dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat (Permen Perumahan Rakyat Nomor:22/PERMEN/M/2008), yang mengatur ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang menjadi urusan wajib daerah serta berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman diukur dari 2 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh	%	99,11	99,11	99,22	99,53	100,31	99,55	0 Kumuh
2.	Persentase Rumah Layak Huni	%	99,53	99,53	99,58	99,53	99,95	99,73	100
Rata-Rata Capaian Kinerja							100,13%		

Realisasi Indikator sasaran “Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 99,22 tercapai 100,31% dengan kategori Baik Sekali sedangkan Realisasi Indikator Sasaran “Persentase Rumah Layak Huni” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 99,58 tercapai 99,95 dengan kategori Baik . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2018 telah tercapai 100,13% dengan kategori Baik Sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh” tahun 2018 adalah 99,53 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 99,11 terjadi kenaikan sebesar 0,42 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Persentase Rumah Layak Huni” tahun 2018 adalah 99,53 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 99,53 dapat dikatakan tetap atau tidak ada perubahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator ini yaitu kegiatan bedah rumah.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh” tahun 2018 adalah 99,53 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 99,55 masih tersisa 0,02 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Persentase Rumah Layak Huni” tahun 2018 adalah 99,53 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 99,73 masih tersisa 0,20.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh” tahun 2018 adalah 99,53 namun dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 0% bebas kumuh dengan kata lain tinggal 0,47 maka dapat dikatakan Kota Banjarbaru bebas dari Kumuh, sedangkan Realisasi kinerja indikator “Persentase Rumah Layak Huni” tahun 2018 adalah 99,53 dibandingkan dengan target akhir RPJMN sebesar 100% untuk mencapai target masih kurang 0,47%.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

1. Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh

- a. Terlaksananya deliniasi kumuh Kota Banjarbaru, sehingga dapat mengurangi luas kawasan kumuh.
- b. Terlaksananya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru.

2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang menunjang indikator, sehingga belum mencapai target yang ditentukan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Pencapaian indikator sasaran ini di tahun 2018 didukung melalui “Program Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh” dengan jumlah anggaran Rp. 3.554.651.700-, dengan realisasi Rp. 3.514.156.701,-. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dapat

dilakukan efisiensi terhadap anggaran yang digunakan sebesar Rp. 40.494.999 atau 1,14%.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
2. Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Koordinasi Penyelesaian Permukiman Kumuh

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.3.554.651.700 telah direalisasi Rp.3.514.156.701 sebesar atau 98,9% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.554.651.700	3.514.156.701	98,9
Jumlah		Rp.3.554.651.700	Rp.3.514.156.701	98,9

LANGKAH DI MASA MENDATANG

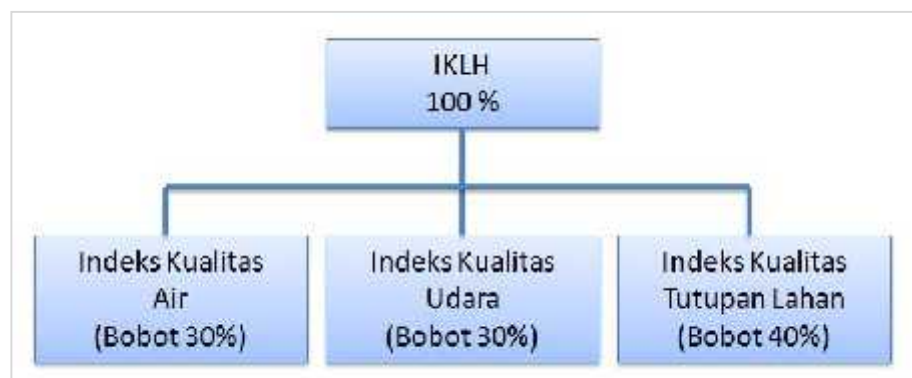
1. Peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan profesional sesuai bidang dan keahlian dalam melaksanakan kegiatan melalui pelatihan teknis.
2. Melaksanakan program atau kegiatan berkenaan dengan pengurangan luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun berikutnya, sehingga dapat mencapai target 0% kumuh pada tahun 2019 sesuai target RPJMN.

3. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Rumah Layak Huni, sehingga dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Banjarbaru dan meningkatkan rumah layak huni menjadi 100% sesuai dengan target RPJMN pada tahun 2019.

6. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.



Indeks kualitas air (IKA) memberikan gambaran tentang mutu air yaitu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Indeks kualitas udara (IKU); Digunakan untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambient. Indeks tutupan lahan Lahan (IKTL) menggunakan standar luas lahan RTH, Taman, Pemakaman, Hutan Kota disetiap Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah (1) Kualitas air, yang diukur berdasarkan parameter parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Adapun data IKLH Kota Banjarbaru pada Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Indeks kualitas air (Indeks pencemaran air) dengan Nilai 43,33

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah melakukan pengujian kualitas air pada titik hulu, titik hilir dan titik tengah sebanyak 5 kali terhadap 5 sungai yaitu Sungai Kemuning, Basung, Durian, Tonhar dan Guntung Payung serta Pengujian 16 Parameter.

Hasil dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa 5 titik kategori cemar sedang 10 titik kondisi cemar ringan sehingga nilainya 43,33.

Mutu Air	Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentasi Pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Permutu Air
Memenuhi	0	0 %	70	0
Ringan	10	67%	50	33,33
Sedang	5	33%	30	10
Berat	0	0	10	0
Total	15	100%		43,33

b. Indeks kualitas udara dengan nilai 85,09

Pengujian kualitas udara ambien di Wilayah Banjarbaru ditetapkan 6 (enam) lokasi titik sampling dengan waktu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, sehingga dalam 1 tahun dilakukan pengujian 12 Titik dengan 6 (enam) titik sampling, lokasi adalah sebagai berikut:

1. Bundaran Liang Anggang Km. 20,00 mewakili wilayah padat Transportasi.
2. Bundaran Landasan Ulin Km. 24,00 mewakili wilayah padat Transportasi.
3. Bundaran Simpang 4 Banjarbaru Km. 34,00 mewakili wilayah padat Transportasi.
4. Lapangan Murjani Banjarbaru mewakili wilayah perkantoran.

5. Perumahan Kehutanan Banjarbaru mewakili wilayah Pemukiman.
6. LIK (Lingkungan Industri Kecil) Liang Anggang mewakili wilayah industri.

Hasil analisis Laboratorium Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahun 2018 yang dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahap 1 Bulan Mei sampai Juni 2018, dan Tahap 2 Bulan September sampai Oktober 2018. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut :

PERUNTUKAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP II	TAHAP II
	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Transportasi	11,80	13,70	19,41	11,58
Industri	9,00	12,90	4,34	6,34
Perumahan	8,00	6,70	11,90	11,04
Perkantoran	10,60	10,30	5,89	5,88

- c. Indeks kualitas tutupan lahan dengan nilai 73,02 (data tahun 2017)

Perhitungan IKLH pada Tahun 2018 bisa dijumlahkan sebagaimana rumusan :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL}) \\
 &= (30\% \times 43,33) + (30\% \times 85,09) + (40\% \times 173,02) \\
 &= 13,00 + 25,53 + 29,21 \\
 &= 67,73
 \end{aligned}$$

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	53,70	53,70	66,39	67,73	102	67,47	68.50
Capaian Kinerja							102%		

Realisasi Indikator sasaran “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 66,39 terealisasi 67,73 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 102% dengan kategori Baik Sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2018 adalah 67,73 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 53,70 terjadi kenaikan sebesar 14,03.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2018 adalah 67,73, dimana hal ini sudah melebihi target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 67,47.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2018 adalah 67,73 namun dibandingkan dengan RPJMN tahun 2021 sebesar masih tersisa 0,77.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

1. Dilaksanakannya sosialisasi, kampanye dan aksi-aksi kepada masyarakat untuk peduli tidak membuang sampah / limbah ke sungai.
2. SKPD terkait telah melakukan kegiatan - kegiatan yang mendukung dalam rangka pencapaian program seperti normalisasi sungai/ pemeliharaan saluran yang membuat sungai terawat, bersih dan bebas dari sampah.
3. Belum adanya data inventarisasi sumber/beban pencemar untuk perhitungan daya tampung sungai yang dipantau .

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

A. Sumber daya manusia

Mencermati dan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , maka dapat dikemukakan bahwa baik disisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya yang memiliki keahlian di rasakan sudah cukup, hal ini dapat dilihat dari tahun sebelumnya dengan sumber daya yang sama, namun mampu meningkatkan IKLH ke angka yang lebih tinggi.

B. Sumber daya anggaran

Sedangkan untuk alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan IKLH pada masing masing program dan kegiatan pada tahun 2018 ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,59% atau sebesar Rp. 2.827.750,00

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Kegiatan Kota Bersih, Hijau dan Sehat
 - c. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - d. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

e. Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.482.568.500 telah direalisasi sebesar Rp.479.740.750 atau 99,41% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.482.568.500	Rp.479.740.750	99,41
Jumlah		Rp.482.568.500	Rp.479.740.750	99,41

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Menambah parameter mikrobiologi untuk memeriksa sampel air badan air
2. Menyusun daya tampung dan daya dukung seluruh sungai yang dipantau
3. Melaksanakan penerapan Perda IMB bagi pengembang menyediakan RTH seluas 20% di perumahan dan membuat sumur resapan
4. Melaksanakan penanaman dan penghijauan di hulu sungai
5. Melakukan Konservasi pada bagian hulu sungai (sumber air) dengan menjadikan RTH dan membebaskan daerah hulu
6. Memperhatikan dampak Lingkungan dalam pelaksanaan proyek
7. Melakukan Pembuatan IPAL Komunal bagi penduduk dibantaran sungai
8. Melakukan Pembuatan septic tank dibantaran sungai
9. Melakukan Pembangunan WC Komunal dibantaran sungai
10. Melakukan Pembuatan Biogas dan pupuk kandang
11. Melakukan Pembentukan Bank sampah dan Pembangunan TPS 3R

12. Melakukan Pembuatan Sistem Aerasi pada aliran sungai untuk mempercepat self puripication (kemampuan memulihkan diri)
13. Melakukan Pembuatan IPAL komunal bagi pabrik tahu atau IPAL pribadi
14. Meningkatkan Pengawasan terhadap Industri kecil dan rumah makan terhadap pembuangan limbah cairnya
15. Penegakan hukum pabrik dan rumah makan yang tidak memiliki IPAL

7. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Adapun Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota, dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Menurut data yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang) bahwa Luasan RTH hingga Tahun 2018 sebanyak 3810,49 ha, sedangkan Luasan wilayah Kota Banjarbaru adalah 37.130 ha. Data tersebut didapat dari Jumlah Kumulatif perijinan IPPT yang memuat luasan sarana atau fasum ditambah jumlah luasan RTH publik yang dimiliki pemerintah kota Banjarbaru serta jumlah luasan RTh private yang terdapat di wilayah kota banjarbaru ditambah data luasan RTH publik yang dibangun.

Pencapaian sasaran Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET SPM
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	10,24	10,24	10,26	10,43	101,65	10,30	50
Capaian Kinerja							101,65%		

Realisasi Indikator sasaran “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 10,26 terealisasi 10,43. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 101,65% dengan kategori Baik Sekali .

Realisasi indikator sasaran “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik” ini diperoleh dari perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{jumlah luasan kota Banjarbaru}} \times 100\% \\ &= \frac{3871,53}{37.130} \times 100\% \\ &= 10,43\%\end{aligned}$$

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik” tahun 2018 adalah 10,43 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 10,24 terjadi peningkatan sebesar 0,19.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik” tahun 2018 adalah 10,43 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 10,30 maka melebihi target sebesar 0,13.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Indikator “Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik” dikaitkan dengan Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Permen PU Nomor:01/PRT/M/2014) sebesar 50% di akhir Tahun 2019, maka dengan Realisasi di Tahun 2018 sebesar 51,31% masih tersisa 39,57%.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

1. Terlaksananya pengadaan/penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau di tiap tahunnya dan berdampak pada penambahan luasan RTH Publik di kota banjarbaru.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wilayah kerjanya untuk menunjang Program Pembangunan Jalan diperlukan 5 orang yaitu 1 kabid, 1 kasi, dan 3 orang staff. Sedangkan pada kondisi sekarang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk program pembangunan jalan terdiri dari 4 orang yaitu 1 kabid, 1 kasi, dan 2 orang staff sehingga efisiensi sebesar 20% untuk melaksanakan program tersebut.

- Sumber Daya Anggaran

Untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp 11.618.345.555 dengan realisasi sebesar Rp.8.472.138.100 sehingga mencapai efisiensi sebesar Rp 3.146.207.455 atau 37,13%.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Kegiatan Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.618.345.555 telah direalisasi Rp. 8.472.138.100 sebesar atau 72,92% dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	11.618.345.555	8.472.138.100	72,92
Jumlah		Rp.11.618.345.555	8.472.138.100	72,92

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melaksanakan penertiban area yang direncanakan menjadi Ruang Terbuka Hijau
2. Melakukan penganggaran Ruang Terbuka Hijau
3. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan RTH publik

8. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)

Indikator Jumlah Kunjungan Wisata

Pemilihan Indikator “Jumlah Kunjungan Wisata” merupakan amanat Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Dikota Banjarbaru terdapat 24 (dua puluh empat) destinasi wisata yang terkelola dengan baik, yaitu sebagai berikut :

1. Museum Lambung Mangkurat
2. Taman Van Der Pijl
3. Wisata Kuliner Minggu Raya
4. Hutan Pinus
5. Kolam Renang Idaman
6. Lapangan DR. Murjani
7. Danau Seran
8. Water Park Aquatica
9. Danau Wisata Kota Citra
10. Kebun raya banua
11. Wisata belanja Qmall
12. Rumah pohon
13. Bekantan park
14. Danau cermin
15. Danau galuh cempaka
16. Masjid agung munawaroh
17. Kampung pejabat
18. Pendulangan cempaka
19. Kampung purun
20. Kampung iwak
21. Amanah borneo park
22. Kampung herbal

23. Kampung korea

24. Meek farm

Data Kunjungan Tamu Hotel/Penginapan
Di Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO	HOTEL / PENGINAPAN	JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA	JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA
1	HOTEL NOVOTEL	30.887	1.673
2	BANJAR PERMAI	2.973	0
3	RAHAYU	1.513	0
4	ALFIN	1.255	2
5	HOTEL GRIYA DUTA	3.679	2
6	NOOR INDAH	626	0
7	ILYAS	44	0
8	RATU ELOK	687	3
9	RIYADH GUEST HOUSE	606	8
10	HOTEL RODITHA	6.079	1.392
11	JELITA BANDARA HOTEL	9.802	193
12	LERINNA INN	1.009	0
13	GRAND DAFAM Q HOTEL	33.622	3.918
JUMLAH		92.782	7.191
TOTAL		99.973 Orang	

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru
(Bidang Pariwisata, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Obyek Pariwisata)

Indikator Persentase Wirausaha Baru

Indikator Persentase Wirausaha Baru menunjukkan kemampuan pembinaan pemerintah kota kepada para wirausaha untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Pada Tahun 2018 jumlah UMKM Binaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru sebanyak 1.719 Bidang Usaha sedangkan Data UMKM Baru sebanyak 332 Bidang Usaha.

Rekapitulasi Data UMKM Binaan
Perbidang Usaha
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	BIDANG							
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	269	17	0	7	0	32	245	570
2	Banjarbaru Utara	213	18	1	25	5	45	265	572
3	Cempaka	65	30	0	3	0	7	76	181
4	Landasan Ulin	89	17	1	10	5	12	95	229
5	Liang Anggang	66	7	0	5	9	13	67	167
Total Keseluruhan		702	89	2	50	19	109	748	1.719

Kegiatan pembinaan terhadap UMKM meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- b. Sosialisasi dan pemberian sertifikasi halal bagi produk makanan/minuman UMKM
- c. Kegiatan pameran Banjarbaru Fair
- d. Kegiatan Pameran Kalsel Expo
- e. Bazar UMKM
- f. Bimtek perluasan akses pasar dan fasilitasi perluasan akses pasar dengan ritel
- g. Pembinaan dan penatausahaan USP koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM)

Rekapitulasi Data UMKM Baru
Perbidang Usaha
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	BIDANG							
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	51	7	0	1	3	11	43	116
2	Banjarbaru Utara	39	7	1	0	1	13	25	86
3	Cempaka	6	17	0	0	0	1	6	30
4	Landasan Ulin	36	3	0	3	5	8	27	82
5	Liang Anggang	4	0	0	1	0	1	12	18
Total Keseluruhan		136	34	1	5	9	34	113	332

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Penganggur terbuka terdiri dari :

- Mereka yang mencari kerja.
- Mereka yang mempersiapkan usaha
- Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang selama seminggu pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan atau bekerja tidak tetap dan mereka yang tidak bekerja mencari pekerjaan.

Pada Tahun 2018 jumlah pencari kerja yang didata oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru sebanyak 6.821 orang sedangkan Jumlah angkatan kerja sebanyak 123.193 orang

Data pencari kerja pada Tahun 2018

No	Pendidikan	Pencari Kerja
1	Tidak Tamat SD	6 orang
2	Tamat SD	56 orang
3	SLTP	380 orang
4	SLTA	4.149 orang
5	Sarjana Muda / Diploma	489 orang
6	Sarjana (S1)	1.704 orang
7	Pasca Sarjana (S2)	37 orang
Total		6.821 orang

Laki	Perempuan
3.959 orang	2.863 orang

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Per Desember 2018)

Data Angkatan Kerja

Menurut Tingkat Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	Maksimum SD	23.919
2	SMTP	22.865

3	SMTA Umum	34.905
4	SMTA Kejuruan	12.682
5	Diploma	7.766
6	Universitas	21.056
	Total	123.193

Sumber : Bidang PPTK, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB) diukur dari 3 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	66.000	86.258	76.800	99.973	130	120.000	-
2.	Persentase Wirausaha Baru	%	14,1	11,51	19,04	19,31	101,42	33,85	-
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,2	6,35	6,15	5,53	110,08	5,95	5,00
Rata-Rata Capaian Kinerja							113,83%		

Realisasi Indikator sasaran “Jumlah Kunjungan Wisatawan” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 76.800 orang tercapai 130% dengan Kategori Baik Sekali, Realisasi Indikator Sasaran “Persentase Wirausaha Baru” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 19,04 tercapai 101,42% dengan Kategori Baik Sekali sedangkan Realisasi Indikator Sasaran “Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 6,15 tercapai 110,08% dengan Kategori Baik Sekali. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 113,83% dengan kategori Baik Sekali .

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Kunjungan Wisatawan” tahun 2018 adalah 99.973 orang namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 86.285 terjadi kenaikan sebesar 13.715, Realisasi kinerja indikator “Persentase Wirausaha Baru” tahun 2018 adalah 19,31% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 11,51% terjadi kenaikan sebesar 7,8% sedangkan Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2018 adalah 5,53% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 6,35 terjadi penurunan sebesar 0,82.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Kunjungan Wisatawan” tahun 2018 adalah 99.973 orang namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 120.000 orang masih tersisa 20.027 orang yang harus masuk target ditahun berikutnya, Realisasi kinerja indikator “Persentase Wirausaha Baru” tahun 2018 adalah 19,31 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 33,85 masih tersisa 14,54 sedangkan Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2018 adalah 5,53% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 5,95 masih tersisa 0,42%

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2018 adalah 5,53 namun dibandingkan dengan RPJMN sebesar 5,50 sudah melebihi target yang ditentukan.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan

1. Tersedianya sumber Daya Kepariwisataaan buatan yang cukup besar dan Potensial untuk dikembangkan di Kota Banjarbaru.

2. Dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dilingkungan tempat wisata sebagai penggerak Kemajuan Destinasi Wisata yang ada di Banjarbaru .
3. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, Untuk mendukung Perkembangan Pariwisata Daerah.
4. Tidak semua Destinasi Wisata menggunakan karcis/tiket retribusi.
5. Target kunjungan Wisatawan kita masih wisatawan lokal dalam Provinsi atau paling jauh provinsi tetangga (Kalimantan Selatan) sehingga tidak melibatkan ASITA sebagai Travel Agent.
6. Wisata lokal yang datang pun kebanyakan melalui jalan darat sehingga tidak bisa diminta data penumpang pesawat dari Angkasa Pura.

Indikator Persentase Wirausaha Baru

1. Adanya komitmen Pimpinan dan aparat yang terkait dalam memberikan dukungan bagi UMKM dari segi pelatihan dan promosi
2. Adanya bantuan modal bagi wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM yang disalurkan ke Kota Banjarbaru.
3. Adanya kerjasama dari pihak ketiga berupa pemasaran produk-produk UMKM dengan Grand Dafam Q Hotel Kota Banjarbaru, Hypermart, dan Transmart.
4. Masih terbatasnya ide dalam berinovasi sebuah produk
5. Masih lemahnya keahlian dalam pengembangan produk
6. Kalah bersaing dalam harga penjualan terhadap produk yang sama.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Komitmen Pimpinan dan aparat yang terkait.
2. Adanya kerjasama dengan Q-Mall Banjarbaru dalam penyelenggaraan Job Fair Banjarbaru Tahun 2018.
3. Banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka di Banjarbaru
4. Masih belum maksimalnya laporan dari perusahaan mengenai data penempatan/rekrutmen pekerja

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan

1. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 6 orang sudah cukup untuk menangani Usaha Jasa Pariwisata (UJP) sebanyak 504 buah. Selain itu diperlukan pelatihan terhadap SDM untuk meningkatkan kompetensi.
2. Kesadaran masyarakat akan destinasi wisata semakin tinggi dengan terbentuknya 14 Pokdarwis yang memiliki destinasi di wilayahnya walaupun dengan keterbatasan anggaran dimana targetnya 13 pokdarwis jadi terdapat peningkatan 1 pokdarwis
3. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap tahun terdapat peningkatan yaitu tahun 2019 sebesar 1.855.0000.000,- terdapat peningkatan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya.

Indikator Persentase Wirausaha Baru dan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam melaksanakan Pelayanan Bidang Tenaga Kerja, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan masih dirasakan kurang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil pelaksana Urusan Tenaga Kerja Sebanyak 17 orang yang terdiri 10 Laki-Laki dan 7 Perempuan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mampu meraih target kinerja melebihi target yang sudah ditetapkan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang tenaga kerja pada masing-masing program pada tahun 2018 efektif dan efisien hal ini terlihat dari realisasi 2 (dua) program yang dilaksanakan bidang tenaga kerja yaitu efisien sebesar 0,5 % dan 0,8 %.

Anggaran pada tahun 2018 pada bidang tenaga kerja masih sangat minim namun pencapaian target kinerja masih mampu melebihi dari target. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal terhadap ketenagakerjaan di daerah, realisasi penggunaan anggaran

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan

1. Program Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Destinasi dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pengendalian Keamanan :
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Daerah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Duta
2. Program Pengembangan Destinasi wisata :
 - Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - Kegiatan Penataan Kawasan dan Amenitas Pariwisata (DAK)
3. Program Pengembangan Kemitraan :
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Indikator Persentase Wirausaha Baru

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif:
 1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 2. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 3. Kegiatan Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
 2. Kegiatan Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB) tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.288.770.540 telah direalisasi Rp. 2.172.981.844 sebesar atau 97,28% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Destinasi dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pengendalian Keamanan	Rp.382.437.600	Rp.334.436.400	92,62
2	Program Pengembangan Destinasi wisata	Rp.262.538.100	Rp.226.628.894	95,01
3	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 24.019.000	Rp.18.019.000	98,9
4	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Rp.261.188.000	Rp.255.588.000	97,86
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp.537.727.760	Rp.526.575.200	97,93
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.548.826.600	Rp.542.066.800	99,49
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.272.033.480	Rp.269.667.550	99,13
Jumlah		Rp.2.288.770.540	Rp. 2.172.981.844	97,28

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan

1. Meningkatkan Promosi Pariwisata didalam dan diluar Daerah.
2. Memberdayakan Duta Wisata sebagai penggiat Promosi Wisata Kota Banjarbaru.
3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat disekitar Destinasi untuk lebih berperan serta secara aktif dalam bidang Kepariwisata.
4. Mengadakan Kegiatan Pelatihan di Bidang Pariwisata dengan Tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan Kompetensi Masyarakat di Bidang Pariwisata.

Indikator Persentase Wirausaha Baru

1. Melaksanakan bintek dalam peningkatan kualitas produk dan membangun kreativitas dalam menciptakan ide atau gagasan dalam menghasilkan produk yang menarik.
2. Melaksanakan bimbingan dalam kemampuan membaca peluang pasar.
3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan meliputi adminisrasi dan keuangan bagi koperasi dan UMKM.
4. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana pemerintah

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja agar memudahkan dalam mencari pekerjaan
2. Pelatihan kewirausahaan agar pencari kerja bisa berwirausaha.
3. Pelaksanaan Job Fair (Pameran Pasar Kerja)
4. Program pemagangan
Program pendidikan penyertaan dengan ikatan

9. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dipilih agar peningkatan PAD menggambarkan peningkatan kemandirian daerah, adapun untuk perhitungan pencapaian sasaran strategis ini adalah Akumulasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun berjalan.

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	Rp.	175,00	230,56	188,60	228,53	121,17	245,10	-
Capaian Kinerja							121,17%		

Realisasi Indikator sasaran “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 188,60 terealisasi 228,53. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 121,17% dengan kategori Baik Sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” tahun 2018 adalah 228,53 Milyar dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 230,56 Milyar terjadi penurunan sebesar 2,03 Milyar.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” tahun 2018 adalah 228,53 Milyar namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 245,10 Milyar masih tersisa 16,57 Milyar.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat target nasional pada indikator “jumlah pendapatan asli daerah (PAD)”.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” karena beberapa hal, antara lain :

1. Meningkatkan basis pajak restoran pada lingkup Kota Banjarbaru.
2. Meningkatnya konsumsi listrik konsumen di wilayah Banjarbaru, sehingga nilai pendapatan pajak penerangan jalan meningkat.
3. Tingginya nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan pada lingkup Kota Banjarbaru yang berimbas pada meningkatnya BPHTB dan penerimaan pembayaran dari Angkasa Pura yang nominalnya cukup besar sehingga over target.
4. Meningkatnya pembayaran PBB karena adanya pemberian insentif penghapusan denda PBB bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Kegagalan pencapaian indikator sasaran “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” karena tidak terealisasi pencapaian target pada empat (4) item pajak yaitu pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bahan galian golongan C / galian mineral bukan logam di tahun 2018, antara lain :

1. Alasan pajak hotel dikarenakan belum optimalnya pemeriksaan yang dibayar oleh pihak objek pajak hotel berbintang sehingga pemungutan pajaknya belum optimal dan pendataan wajib pajak kost atau penginapan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru yang belum maksimal.
2. Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan target yang diadakan pada tahun 2018 adalah target yang pertama kali yang direalisasikan dan pemindahan objek yang akan dicari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) sehingga belum optimal dalam

pencapaian, dan dalam pemungutan pajaknya terkendala dengan kegiatan realisasi hasil panen sarang burung walet yang tidak bisa dimonitor secara real di lapangan.

3. Pajak hiburan tidak tercapai target dikarenakan target sebelumnya di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.546.500.000,- dan di Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp.3.832.000.000,- sehingga kenaikan target melebihi 247,79 % dan banyak kegiatan pajak hiburan yang ditutup / tidak beroperasi seperti : Ramona karaoke, Bintang karaoke, Bensco bilyard dll.
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target dikarenakan ada aturan / regulasi yang bertentangan dengan kondisi Kota Banjarbaru yang merupakan Kota yang bukan menjadi tempat pertambangan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat secara optimal.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

1. Sumber Daya Manusia

Mencermati dan memperhatikan kemampuan sumber daya aparatur yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, Sumber Daya manusia yang telah ada yaitu :

- Diklat Penilaian PBB, Penagih Pajak Daerah, PKS (Pelatihan Keterampilan di lingkup sendiri dengan narasumber dari KPP Pratama banjarbaru / Wilayah Banjarmasin).
- Sertifikasi keahlian (Fungsional Penilai PBB).
- Sedangkan juru tagih sudah diusulkan untuk mengikuti diklat tentang strategi penagihan.
- Perlunya Pejabat Fungsional verifikasi pajak dan juru sita pajak dengan cara memberikan kesempatan diklat yang sesuai dengan pejabat fungsional tersebut.
- Tenaga IT yang bersertifikat sudah ada 1 (satu) orang yang pernah mengikuti sekolah singkat 1 Tahun di STAN (Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara)/kualifikasi profesionalisme dibidangnya. Perlu diadakan kerjasama dengan STAN untuk peningkatan SDM.

2. Sumber Daya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk penanganan konflik pada masing-masing program pada tahun anggaran 2018 ini sudah mencukupi pencapaian target untuk Tahun 2018.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB
3. Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah
4. Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah
5. Intensifikasi Penagihan Pajak
6. Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah
7. Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah
8. Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD
9. Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak
10. Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah
11. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.3.443.268.098 telah direalisasi Rp.3.074.272.4030 sebesar atau 89,28% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.443.268.098	3.074.272.403	89,28
Jumlah		Rp.3.443.268.098	Rp.3.074.272.4030	89,28

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Langkah di masa mendatang untuk meningkatkan capaian indikator, yaitu :

1. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya penerimaan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air bawah tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan / PBB dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan) bagi pembangunan Kota Banjarbaru sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya dan membayarkannya tepat waktu.
2. Melakukan Koordinasi yang intensif dengan mitra kerjasama (Wajib Pajak , BPN, Notaris dan Bank Kalsel).
3. Melakukan komunikasi dan informasi terkini peraturan dan petunjuk teknis tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
4. Memanfaatkan momen - momen kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengedukasi kesadaran membayar pajak tepat waktu di semua lapisan masyarakat.
5. Memobilisasi Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak.

6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengusulan penghapusan piutang PBB dan sewa tanah .

10. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Investasi

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp. Milyar) dipilih dengan maksud yaitu untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi dan peluang investasi yang dimilikinya.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

Pencapaian sasaran meningkatnya investasi diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp. Milyar)	Rp.	1.162,60	1.090,4	1.556,60	1.630,45	104,74	2.976,6	-
Capaian Kinerja							104,74%		

Realisasi Indikator sasaran “Nilai Investasi PMA dan PMDN” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.556,60 Milyar terealisasi 1.630,45 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 104,74% dengan kategori Baik Sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2018

Realisasi kinerja indikator “Nilai Investasi PMA dan PMDN” tahun 2018 adalah 1.556,60 Milyar dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1.090,4 Milyar terjadi kenaikan sebesar 73,85 atau 6,77%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Nilai Investasi PMA dan PMDN” tahun 2018 adalah 1.630,45 Milyar namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 2.976,6 Milyar masih tersisa 1.346,15 Milyar.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat Target Nasional pada indikator “Nilai Investasi PMA dan PMDN” .

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Realisasi nilai investasi PMDN tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan, pencapaian kinerja tersebut didukung oleh:

- a. Adanya promosi potensi dan peluang investasi oleh SKPD terkait ditingkat lokal, regional dan nasional melalui berbagai event sesuai dengan bidang masing-masing.
- b. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru bersama dengan SKPD terkait perizinan untuk memberikan kemudahan, penyederhanaan persyaratan, prosedur dan percepatan proses perizinan berusaha dengan pelayanan berbasis IT.
- c. Kebijakan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan adanya daya dukung lingkungan wilayah berdasarkan tata ruang sehingga ada kepastian peruntukan investasi sesuai dengan sektor yang diinginkan investor.

Sedangkan faktor pendukung cepatnya perkembangan investasi di Kota Banjarbaru adalah :

- a. Letak kota Banjarbaru yang dilintasi oleh Jalan negara Penghubung 3 (tiga) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
- b. Adanya Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru;
- c. Tidak Jauh dari pelabuhan laut Trisakti yang berjarah ± 21 KM dari Banjarbaru;
- d. Terpusatnya Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- e. Terpusatnya Satuan TNI dan POLRI Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- f. Adanya Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Banjarbaru;
- g. Letak geografi tanah rata-rata datar dan keras (tidak rawa) dan hanya berjarak 35 KM dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin, sehingga biaya pembangunan lebih murah dibandingkan di Banjarmasin;
- h. Masih banyak lahan kosong untuk perkembangan investasi dan harga tanah relatif murah dibandingkan di Banjarmasin.

Sedangkan faktor penghambat Investasi di Kota Banjarbaru adalah:

- a. Masih banyak surat tanah yang tumpang tindih di Kota Banjarbaru
- b. Untuk Investasi perusahaan Industri berskala besar yang memerlukan daya listrik besar PLN belum bisa terpenuhi
- c. Suasana ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh sekali terhadap perkembangan investasi di Indonesia umumnya, dan di Banjarbaru khususnya, terutama pada harga jual batubara, karet dan kelapa sawit yaitu dengan turunnya beberapa harga komoditi tersebut.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang melaksanakan Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan masih dirasakan kurang, dengan jumlah sumberdaya aparatur sebanyak 50 orang mampu meraih target kinerja melebihi target yang sudah ditetapkan

b. Sumber Daya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang penanaman modal pada masing-masing program pada tahun 2018 efektif dan efisien, hal ini terlihat dari realisasi 2 (dua) program yang dilaksanakan bidang penanaman modal yaitu efisien sebesar 1,6% dan 5,7%. Anggaran pada Tahun 2018 pada bidang penanaman modal masih sangat minim namun pencapaian target kinerja masih mampu melebihi dari target. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal terhadap penanaman modal di daerah

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pameran Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya investasi tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.266.335.300 telah direalisasi Rp.260.750.300 sebesar atau 97,86% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	202.950.000	199.765.000	98,43
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	63.385.300	60.985.300	97,3
Jumlah		Rp.266.335.300	Rp.260.750.300	97,86

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Rencana tindak lanjut untuk mencapai sasaran strategis pada tahun berikutnya:

1. Mengikuti kegiatan promosi yang lebih prioritas yang dapat menjual potensi dan peluang investasi di Kota Banjarbaru
2. Memaksimalkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang berdampak pada peningkatan investasi
3. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi terkait prosedur dan kebijakan dalam pelayanan perizinan (web, brosur, spanduk dan lain-lain).

11. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian

Pasar tradisional akan dikatakan moderen apabila rancangan bangunan sesuai (seperti tersedianya ruangan aula pertemuan pada pasar, ruang laktasi, ruang kesehatan, dan kantor), dan tata kelola pasar yang baik dan berkesinambungan. Dengan harapan Pasar rakyat menjadi pasar yang bersih, aman, nyaman, segar dan terpercaya.

Pemerintah Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 sudah membangun 2 (dua) pasar yang dapat dikategorikan pasar modern menurut SNI 8152 : 2015 yaitu pasar Laura di Liang Anggang dan pasar Karang Anyar di Loktabat Utara. Pasar tersebut dibangun dengan sarana perdagangan yang kompetitif dan prototipe pasar serta kelengkapan fasilitas seperti kantor, aula pertemuan, ruang laktasi, pos kesehatan, toilet dan tempat cuci tangan. Pembangunan dari 2 (dua) pasar modern dibiayai dari dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan.

Dari 2 (dua) Pasar yang dapat golongan sebagai pasar modern diatas, belum bisa beroperasi dengan pengelolaan secara modern, karena masih menunggu proses Hibah dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.



PASAR RAKYAT LAURA - KEC. LIANG ANGGANG



PASAR RAKYAT KELURAHAN LOKTABAT UTARA

Pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Pasar Tradisional yang Dikelola Secara Modern	%	40	40	40	40	100	80	-
Capaian Kinerja							100%		

Realisasi Indikator Sasaran “Persentase Pasar Tradisional yang dikelola Secara Modern” ditargetkan sebesar 40% terealisasi 40% Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pasar Tradisional yang dikelola Secara Modern” tahun 2018 adalah 40% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 40% tidak mengalami perubahan.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi Kinerja Indikator “Persentase Pasar Tradisional yang dikelola Secara Modern” Tahun 2018 adalah sebesar 40% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 80% masih tersisa realisasi sebesar 40%.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Jika dibandingkan dengan target Nasional realisasi Kinerja Persentase Pasar Tradisional yang dikelola secara Moderen tidak ada perbandingan, hal ini dikarenakan pembangunan pasar tradisional merupakan program oleh Presiden Republik Indonesia dalam nawacita 1000 pasar tradisional yang terbangun seluruh Indonesia.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

- a. Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan perekonomian rakyat
- b. Adanya Pasar rakyat dan galery/gedung Promosi sebagai tempat untuk memasarkan produk – produk unggulan daerah Kota Banjarbaru.
- c. Belum terlaksananya operasional pasar yang dikelola secara moderen pada dikarenakan lamanya/ masih menunggu proses hibah dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
- d. Belum adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan.
- e. Pasar rakyat diKota Banjarbaru belum dapat dikategorikan modern dikarenakan belum lengkapnya sarana dan prasarana fisik
- f. Belum tertibnya para pedagang terhadap aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota sehingga menghambat kelancaran pengelolaannya.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian, maka dapat dikemukakan dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kebijakan urusan Perdagangan masih dirasakan kurang. Namun dengan jumlah Aparatur Sipil Negeri sebanyak 49 orang dalam mampu meraih target kinerja yang sudah ditetapkan.

- Sumber Daya Anggaran

Sedangkan alokasi Dana Anggaran yang disediakan pada Bidang Pasar pada program kegiatan Tahun 2008 dianggap sudah efektif dan efisien, hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan yaitu efisiensi sebesar Rp 394.285.975 atau 8,34%. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar berdampak lebih maksimal.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar dengan nama Kegiatan:

1. Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan pasar (DAK)
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
3. Kegiatan Peningkatan dan pengawasan PAD Pasar

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.4.729.342.000 telah direalisasi Rp.4.335.056.025 sebesar atau 91,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	4.729.342.000	4.335.056.025	91,66
Jumlah		Rp.4.729.342.000	Rp.4.335.056.025	91,66

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Meningkatkan Pembangunan pasar tradisional yang dikelola secara modern
2. Revitalisasi pasar rakyat yang sudah ada
3. Perluasan / renovasi pasar sesuai dengan petunjuk teknis kementerian.
4. Menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah
5. Meningkatkan Capacity building pengelola pasar
6. Mendorong pasar rakyat berdaya saing dan maju bersama dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas dalam rangka untuk menunjang peningkatan PAD.
9. Perlunya menerapkan program aplikasi Database dalam pengelolaan Keuangan retribusi pelayanan pasar.
10. Meningkatkan koordinasi dengan semua elemen yang berhubungan dengan Pungutan Retribusi.

12 SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Indikator Ketersediaan Pangan Daerah diukur dengan skor PPH. Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Skor PPH digunakan untuk mengetahui kualitas pangan dilihat dari keragamannya pola pangan, biasanya untuk menilai kualitas dari sisi ketersediaan dan konsumsi pangan.

Untuk penilaian keragaman ketersediaan pangan dengan instrumen PPH atau Skor PPH menggunakan data ketersediaan pangan yang disajikan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) pada tingkat penyediaan 2.400 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk penilaian keragaman mutu konsumsi pangan dengan instrumen PPH atau skor PPH menggunakan data konsumsi pangan dengan AKE pada tingkat konsumsi 2.150 kkal/kapita/hari.

Adapun Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Banjarbaru Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket.
1.	Padi-padian	1.422	59,2	0,5	29,9	25,0	25,0	+
2.	Umbi-umbian	114	4,7	0,5	2,4	2,4	2,5	-
3.	Pangan Hewani	184	7,7	2,0	15,3	15,3	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	339	14,1	0,5	7,1	5,0	5,0	+
5.	Buah/Biji Berminyak	28	1,2	0,5	0,6	0,6	1,0	-
6.	Kacang-kacangan	63	2,6	2,0	5,3	5,3	10,0	-

7.	Gula	163	6,8	0,5	3,4	2,5	2,5	+
8.	Sayur dan Buah	124	5,2	5,0	25,9	25,9	30,0	-
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.436	101,5		89,5	81,93	100,0	

Susunan Pola Pangan harapan (PPH) yang disajikan pada tabel di atas terdiri atas 8 (delapan) kelompok makanan, tidak termasuk kelompok bahan makanan lain-lain. Adapun jumlah ketersediaan energi perkapita perhari di Kota Banjarbaru sebesar 2.436 kkal/hari. Angka tersebut sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.400 kkal/hari atau 1,5 persen melebihi standar angka kecukupan energi yang ditetapkan secara nasional.

Dari masing-masing kelompok bahan makanan, terdapat 3 (tiga) kelompok bahan makanan yang memiliki skor PPH diatas skor PPH yang dianjurkan, yaitu kelompok padi-padi, minyak dan lemak dan gula. Sedangkan kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayuran dan buah masih di bawah skor PPH yang dianjurkan.

Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Ketersediaan Pangan Daerah	Skor PPH	80,09	80,09	81,00	81,93	102,29	88,00	86,93
Capaian Kinerja							102,29%		

Realisasi Indikator sasaran “Ketersediaan Pangan Daerah” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 81,00 terealisasi 81,93. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 102,29% dengan kategori Baik Sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2018

Realisasi kinerja indikator “Ketersediaan Pangan Daerah” tahun 2018 adalah 81,93 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 80,09 terjadi kenaikan sebesar 1,84.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Ketersediaan Pangan Daerah” tahun 2018 adalah 81,93 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 88,00 masih tersisa 6,07.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Ketersediaan Pangan Daerah” tahun 2018 adalah 81,93 dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 86,93 masih tersisa realisasi sebesar 5.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

- a. Meningkatnya ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru, sehingga kemampuan daya beli juga meningkat, terutama daya beli terhadap kebutuhan bahan pangan pokok keluarga.
- b. Wilayah Kota Banjarbaru sangat strategis dan dikelilingi oleh Kabupaten penghasil lumbung pangan, sehingga bahan pangan selalu tersedia setiap saat, disamping Kota Banjarbaru juga penghasil berbagai macam sayuran.
- c. Masyarakat Kota Banjarbaru sudah mulai selektif dalam membeli bahan pangan, sehingga bahan pangan yang dibeli sudah memperhatikan kuantitasnya dan kualitas gizinya serta keberagaman dari bahan pangan itu sendiri.

Kendala atau hambatan pencapaian target kinerja:

Dari masing-masing kelompok bahan makanan (Tabel 5) terdapat 3 (tiga) kelompok bahan makanan yang memiliki skor PPH diatas skor PPH

yang dianjurkan, yaitu kelompok padi-padi, minyak dan lemak dan gula. Sehingga Skor Angka Kecukupan Energi (% AKE) mencapai 101,5 %. Skor maksimalnya adalah 100, sedangkan dari Angka Kecukupan Energinya (AKE) adalah 101,5 %, hal ini terjadi karena masyarakat kota Banjarbaru masih didominasi oleh pola makan dan budaya mereka, bahwa kalau belum makan nasi artinya belum makan, disamping itu juga kebiasaan masyarakat yang suka pada jenis makanan manis dan berlemak.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia didalam sektor pertanian adalah petani dan penyuluh pertanian. Dengan kata lain petani merupakan sumberdaya manusia yang berperan aktif dalam meningkatkan produksi pertanian dan penyuluh pertanian mendampingi petani dalam hal budidaya dan informasi teknologi usaha pertaniannya, sehingga antara petani dan penyuluh sangat berperan aktif dalam usaha meningkatkan hasil produksi pertanian. Di Kota Banjarbaru masih banyak terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai petani, ini terbukti dengan banyaknya sayur-sayuran yang dihasilkan dari Kota Banjarbaru bahkan sampai dijual kedaerah tetangga.

Selain sumberdaya diatas, yang perlu dicermati dan diperhatikan juga adalah kemampuan sumberdaya aparatur yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatnya ketahanan pangan daerah, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun berdasarkan kompetensi yang dimiliki khususnya yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan program dan kegiatan dirasakan masih kurang. Walaupun demikian kegiatan-kegiatan masih dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dan capaian target dapat terealisasi dengan hasil maksimal.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran juga merupakan salah satu sumber daya esensial dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) pada tahun 2018 ini hampir seluruh kegiatan realisasi keuangannya diatas 90% dan ada pula yang realisasi keuangannya 100%. Walaupun realisasi keuangannya tidak seluruhnya 100% akan tetapi realisasi fisiknya semuanya 100%, dan pencapaian target kinerja sebesar 101,15%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada urusan ketahanan pangan.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
5. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
6. Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin
7. Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru
8. Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka
9. Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang
10. Pendataan dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan
11. Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
12. Ketersediaan Pangan Masyarakat
13. Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya ketahanan pangan daerah tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.745.027.360 telah direalisasi Rp.737.916.390 sebesar atau 99,05% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	745.027.360	737.916.390	99.05
Jumlah		Rp.745.027.360	Rp.737.916.390	99,05

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melakukan upaya peningkatan produksi melalui penerapan teknologi dan penambahan luas tanam pertanian, dan bisa juga melalui kebijakan impor dan ekspor untuk jenis-jenis pangan non produksi sehingga ketersediaan pangan yang bisa dikonsumsi masyarakat dapat terus tersedia sepanjang tahun tanpa mengalami lonjakan harga yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan Skor PPH Kota Banjarbaru perlu meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan, namun yang terpenting juga merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi kecukupan gizi yang berimbang.
3. Perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman dengan memanfaatkan pangan lokal disekitar pekarangan rumah tangga masing-masing.
4. Meningkatkan peranan instansi lintas sektor dalam berkolaborasi dan kerjasama seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan

Masyarakat sehingga mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Banjarbaru melalui berbagai kegiatan di Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan Skor PPH.

13. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Nilai SAKIP

Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Pentingnya akuntabilitas terhadap tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain.

Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dilihat peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun penilaian terhadap indikator kinerja tersebut memiliki komponen yang dinilai dengan memiliki bobot penilaian meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja : 30 %
- b. Pengukuran Kinerja : 25 %
- c. Pelaporan Kinerja : 15 %
- d. Evaluasi Internal : 10 %
- e. Capaian Kinerja : 20 %

Hasil penilaian terhadap indikator kinerja dalam hal ini yaitu Nilai SAKIP, memiliki 7 (tujuh) kategori Tingkat Akuntabilitas sebagai berikut:

- a. AA > 90 - 100 Sangat memuaskan
- b. A > 80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
- c. BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

- d. B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
- e. CC > 50 - 60 Cukup (memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
- f. C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
- g. D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar.

Adapun hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

No	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI TAHUN 2017	NILAI TAHUN 2018
1	Perencanaan Kinerja	30	20.56	20.93
2	Pengukuran Kinerja	25	16.19	16.24
3	Pelaporan Kinerja	15	10.18	10.47
4	Evaluasi Internal	10	4.96	5.54
5	Capaian Kinerja	20	8.46	10.10
	NILAI HASIL EVALUASI	100	60.35	63.28
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		B	B

Indikator Nilai LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penilaiannya berdasarkan atas evaluasi capaian realisasi indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori :

1. 3,00<..... 4,00 (sangat tinggi)
2. 2,00<..... 3,00 (tinggi)
3. 1,00<..... 2,00 (sedang)
4. 0,00 1,00 (rendah)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (dengan bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).

a. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan (dengan bobot 70% dari 95%) dan pada tataran Pelaksana Kebijakan (dengan bobot 30% dari 95%).

1. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%).
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%).
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
4. Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%).

5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
 6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
 7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
 8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
 9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
 10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%).
 11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%).
 12. Pengelolaan potensi daerah (5%).
 13. Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%).
- II. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.
- ✓ Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (dengan bobot 40% dari 70%) yaitu:
1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
 3. Penataan kelembagaan daerah (10%).
 4. Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
 5. Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
 6. Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).

7. Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%)
- ✓ Penilaian aspek capaian kinerja (dengan bobot 60% dari 70%) dengan rincian:
 1. Untuk urusan wajib bobotnya 80% dari 60% terdiri dari 78 Indikator Kinerja Kunci (IKK):
 - a. Pendidikan (20%)
 - b. Kesehatan (15%)
 - c. Lingkungan Hidup (5%)
 - d. Pekerjaan Umum (5%)
 - e. Koperasi dan UKM (2%)
 - f. Perumahan (4%)
 - g. Ketahanan Pangan (2%)
 - h. Kependudukan dan Catatan Sipil (5%)
 - i. Tenaga Kerja (2%)
 - j. Perencanaan Pembangunan (5%)
 - k. Kepemudaan dan Olahraga (2%)
 - l. Penanaman Modal (2%)
 - m. Tata Ruang (3%)
 - n. Otonomi Daerah (2%)
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%)
 - p. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (2%)
 - q. Perhubungan (2%)
 - r. Komunikasi dan Informatika (2%)
 - s. Pertanahan (1%)
 - t. Kesatuan Bangsa dan Politik (2%)
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
 - v. Sosial (3%)
 - w. Budaya (3%)
 - x. Statistik (1%)
 - y. Kearsipan (2%)
 - z. Perpustakaan (2%)

2. Untuk urusan pilihan bobotnya 20% dari 60% terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan :
 - a. Kelautan dan Perikanan (12,5%)
 - b. Pertanian (20%)
 - c. Kehutanan (12,5%)
 - d. Energi dan SDM (12,5%)
 - e. Pariwisata (12,5%)
 - f. Industri (12,5%)
 - g. Perdagangan (12,5%)
 - h. Transmigrasi (5%)
- ✓ Penilaian terhadap indeks kesesuaian materi dengan bobot 5% terdiri dari :
 1. Desentralisasi (65%)
 2. Tugas Pembantuan (20%)
 3. Tugas Umum Pemerintahan (10%)
 4. Kelengkapan Laporan (5)

Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan diberikan opini WTP artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip

akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) opini audit yang diberikan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Tidak Wajar

Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya.

4. Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of opinion)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak dan auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

Indikator Nilai Maturitas SPIP

Indikator ini dapat menjelaskan karakteristik penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru. Indikator ini mempunyai makna peringkat pencapaian penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas dan skor. Untuk mendapatkan hasil capaian indikator SPIP ini cara yang digunakan adalah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Assesment) Maturitas SPIP oleh Inspektorat tiap tahunnya dan kemudian dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat minimal 2 (dua) tahun sekali.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP difokuskan pada 25 (dua puluh lima) sub unsur SPIP, masing-masing sub unsur mempunyai 5 (lima) indikator, sehingga terdapat 125 (seratus dua puluh lima) buah parameter level maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum) dengan rincian sebagai berikut:

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	KETERANGAN
0	Belum Ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern
1	Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
2	Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya.
3	Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi dengan baik namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.
4	Terkelola dan Terukur	Pengendalian intern diterapkan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.
5	Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan didukung pemantauan secara otomatis.

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah diukur dari 4 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B (63,28)	100	A	-
2.	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi (3,05)	101	Sangat Tinggi	
3.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	
4.	Nilai Maturitas	Nilai	3,00	2,40	3,05	3,06	100,3	3,20	3,10
Rata-Rata Capaian Kinerja							100,33%		

Realisasi Indikator sasaran “Nilai SAKIP” pada tahun 2018 ditargetkan Nilai B terealisasi 100% , Realisasi Indikator Sasaran “Nilai LLPD” pada tahun 2018 ditargetkan Nilainya sangat Tinggi terealisasi 101%, Realisasi Indikator Sasaran “Opini BPK” pada tahun 2018 ditargetkan Opini WTP terealisasi 100% sedangkan Realisasi Indikator sasaran “Nilai Maturitas SPIP” ditargetkan sebesar 3,05 terealisasi 3,060%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja rata-rata capaian kinerja tahun 2018 telah tercapai 100,33% dengan kategori Baik Sekali .

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Indikator Nilai SAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memperoleh nilai 63,28 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah menunjukkan hasil yang baik.

Apabila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2017 lalu yang mendapat nilai 60,35 atau B yang termasuk dalam kategori tingkat akuntabilitas Baik, maka capaian kinerja pada tahun 2018 dapat dikatakan mengalami kenaikan. Sehingga pada akhir tahun 2021 diharapkan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat terealisasi dengan memperoleh nilai A.

Indikator Nilai LPPD

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2017, peringkat sementara kota Banjarbaru berada pada urutan 7 dengan skor 3,0509 (prestasi Sangat Tinggi) untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Terjadi Peningkatan dibanding tahun 2016 yang berada di peringkat 12 dengan 2,98 (prestasi tinggi). Namun demikian penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional di tetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Status LPPD kota

Banjarbaru tahun 2017 secara Nasional baru akan di ketahui pada tahun 2019 pada peringatan Hari otonomi Daerah.

Data hasil evaluasi Tim Daerah EPPD propinsi Kalimantan Selatan terhadap LPPD kota Banjarbaru Tahun 2016 di bandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

		BOBOT	SKOR TAHUN 2016	SKOR TAHUN 2017
Skor Evaluasi LPPD		100%	2,9835	3,0509
A	Kesesuaian Materi	5%	4,0000	3,0000
B	Capaian Kinerja	95%	3,0536	3,0536
1	Tataran Pengambil Kebijakan	30%	3,6915	3,6915
a	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Daerah	10%	3,5800	4,0000
b	Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan Pemerintah, Serta Antar Pemda Dalam Rangka Pengembangan Otda	12%	3,7000	3,7000
c	Keselarasan Antara Kebijakan Pemda Dengan Kebijakan Pemerintah	22%	3,7000	3,800
d	Efektivitas Hubungan Antara Pemda Dan DPRD	5%	3,5000	4,0000
e	Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan keputusan	3%	4,0000	4,0000
f	Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh KDH Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan	5%	4,0000	4,0000
g	Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan	3%	1,0000	4,0000
h	Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemda dan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah	5%	2,5000	4,0000
i	transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil	6%	1,9000	3,3500

j	Intensitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD Dan Pinjaman / Obligasi Daerah	3%	4,0000	2,0000
k	Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan APBD	13%	3,6000	3,8500
l	Pengelolaan Potensi Daerah	5%	1,5000	2,0000
m	Terobosan Inovasi Baru	8%	1,9000	3,2500
		100%		
2	Tataran Pelaksana Kebijakan	70%	2,816	2,780
a	Aspek Generik	40%	3,293	3,011
1)	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	12,50%	2,455	2,545
2)	Ketaatan Thd Peraturan / UU	7,50%	4,000	3,515
3)	Penataan kelembagaan	10,00%	2,773	2,942
4)	Pengelolaan kepegawaian	12,50%	3,267	2,676
5)	Perencanaan pembangunan	17,50%	3,970	3,515
6)	Pengelolaan keuangan	17,50%	2,658	2,389
7)	Pengelolaan barang milik	12,50%	4,000	3,515
8)	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	10,00%	3,406	3,297
b	Aspek SPM	60%	2,499	2,626
1)	Urusan Wajib	80%	2,670	2,742
2)	Urusan Pilihan	20%	1,816	2,237

Terjadinya peningkatan skor tahun 2017 dibanding tahun 2016 karena secara substansi memang terdapat banyak aspek yang mengalami Peningkatan pada beberapa Indikator Kinerja Kunci seperti aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah, Keselarasan antara kebijakan Pemda dengan Kebijakan Pemerintah, Efektifitas Hubungan antara Pemda dan DPRD, Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

pada Peraturan Perundang-undangan, Intensitas dan Efektivitas proses Konsultasi Publik antara Pemda dan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang strategis dan Relevan untuk Daerah, transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil, Efektifitas Perencanaan Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD, Pengelolaan Potensi Daerah dan Terobosan Inovasi baru. Diantara yang disebutkan diatas tidak hanya mengalami peningkatan namun juga mendapatkan nilai yang sempurna berdasarkan hasil Validasi dari Tim Pusat.

Peningkatan tersebut juga memberikan dampak pada hasil akhir EKPPD terhadap LPPD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai 3,0509 predikat Sangat Tinggi yang pada tahun 2016 hanya memperoleh nilai 2,9835 predikat tinggi.

Pada aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah terjadi kenaikan kinerja namun tidak meningkatkan skor, seperti rasio personil Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk dari 5,135 pada tahun 2015 menjadi 2,508 pada tahun 2016 (Rasio ideal dan sangat tinggi jika rasionya <0.008 , dan rendah jika >1). Demikian juga rasio jumlah ber-IMB walaupun terjadi peningkatan, namun tidak meningkatkan skor (dari 43,433% pada tahun 2015 menjadi 46,280% pada tahun 2016). Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja urusan wajib dan pilihan terjadi kenaikan.

Indikator Nilai Maturitas SPIP

Realisasi kinerja indikator "Nilai Maturitas SPIP" tahun 2018 adalah 3,060 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,400 terjadi kenaikan sebesar 0,66.

Indikator Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun 2018 terhadap target telah tercapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah melewati audit oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota

Banjarbaru Tahun Anggaran 2017, berdasarkan surat dan piagam penghargaan dengan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018. Sedangkan audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 baru dapat diketahui setelah ada hasil pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2019 dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 baru selesai disusun sekitar bulan Maret 2019.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan penghargaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas laporan hasil pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017. Penghargaan tersebut diperoleh karena Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Nilai SAKIP” tahun 2018 adalah Nilai B (60,35) namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 Besaran Nilai A maka Pemerintah Kota Banjarbaru Optimis akan tercapai, Realisasi kinerja indikator “Nilai LLPD” tahun 2018 adalah Sangat Tinggi (3,05) sudah sama dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu Sangat Tinggi, Realisasi kinerja indikator “Opini BPK” tahun 2018 adalah Opini WTP sudah sama dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu Opini WTP sehingga hal tersebut tetap harus dipertahankan sedangkan Realisasi kinerja indikator “Nilai Maturitas SPIP” tahun 2018 adalah 3,060 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 3,20 masih tersisa 0,14%.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Indikator Nilai Maturitas SPIP

Target nasional untuk tingkat Maturitas Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Terdefinisi (nilai 3,000) pada tahun 2019 (berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan). Realisasi kinerja tahun 2018 untuk Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Terdefinisi (nilai 3,060). Hasil ini sudah membantu pencapaian target Nasional, selain itu Pemerintah Kota Banjarbaru telah pula meningkatkan skor target capaian kinerja tahun 2019 dengan skor nilai 3,100.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Indikator Nilai SAKIP

1. Pemerintah Kota Banjarbaru telah mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD)
2. Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen RPJMD sudah berorientasi hasil, tetapi dalam dokumen renstra OPD masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan beberapa indikator kinerja tersebut masih kurang relevan serta kurang cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis.
3. Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh OPD telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara formal dan memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang cukup memadai. Namun masih terdapat indikator kinerja yang berorientasi hasil, kurang relevan dan kurang cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis serta belum dimanfaatkan dalam dokumen penganggaran
4. Beberapa OPD Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyusun cascading kinerja, mulai dari sasaran RPJMD ke sasaran renstra OPD, kemudian dijabarkan kinerja eselon III dan kinerja eselon IV. namun cascading

kinerja tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan perjanjian kinerja khususnya di level eselon III DAN IV

5. Hasil Pengukuran Kinerja Belum Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment.
6. Pengukuran Kinerja instansi dan OPD sudah menggunakan aplikasi manajemen kinerja untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja, namun aplikasi manajemen kinerja yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran
7. Laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan beberapa OPD telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Namun kualitas analisis capaian kinerja dan efisiensi masih perlu ditingkatkan dan informasi keuangan belum dikaitkan dengan pencapaian sasaran organisasi
8. Dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja level pemerintah daerah dan OPD Tahun Berjalan Belum Diunggah Ke Website
9. Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP OPD, namun simpulan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi penerapan sakip yang baik dan belum mampu memberikan feedback kepada perbaikan implementasi di OPD
10. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas OPD, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan dalam kerangka manajemen kinerja telah mampu mendorong perbaikan AKIP di beberapa OPD sehingga beberapa OPD mulai mampu mengidentifikasi adanya penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien

Indikator Opini BPK

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap target telah tercapai yaitu SKPD telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir berdasarkan dari buku tanda terima Laporan Keuangan SKPD Kota Banjarbaru. Atas terlaksananya penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu maka Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 3/BAST-LK/XIX.BJM/3/2018 yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Maret 2018.

2. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 ditetapkan pada tanggal 18 September 2018 kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru dan akan dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (TAPD) dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Desember 2018
3. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD.
 - Rancangan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 ditetapkan pada tanggal 18 September 2018 disampaikan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2018.
4. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2018 disampaikan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru dan akan dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (TAPD) dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi : Peraturan

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.

5. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Rancangan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 6 Oktober 2018
6. Penyusunan laporan BMD dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan barang milik daerah dari seluruh SKPD/Unit Kerja

Indikator Nilai LPPD

1. Pengumpulan data dari SKPD dalam bentuk Laporan tahunan belum tepat waktu.
2. Di tingkat SKPD tidak jarang terjadi mutasi terhadap pejabat/pengelola data dan tidak meninggalkan arsip data secara rapi kepada penggantinya.
3. Masih terdapat penyajian data yang belum tepat dengan materi yang disampaikan.

Indikator Nilai Maturitas SPIP

Keberhasilan pencapaian tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Banjarbaru pada level 3 (tiga) yaitu "terdefinisi" dengan skor 3,060 diperoleh karena SKPD telah menerapkan dan melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya melalui pengendalian terstruktur dan praktik pengendalian tersebut sudah terdokumentasi dengan baik, akan tetapi jika evaluasi yang dilakukan didokumentasi secara memadai skor dapat lebih ditingkatkan lagi. Disamping itu, terdapat beberapa hal

yang juga turut berperan dalam keberhasilan pemenuhan target capaian kinerja, yaitu

- a. standar kompetensi yang telah disusun Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan promosi dan mutasi pejabat;
- b. ditetapkannya secara formal kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi resiko) melalui Surat Edaran Walikota Nomor : 700/01/Inspektorat tanggal 10 November 2017;
- c. telah dilakukannya penilaian risiko terhadap kegiatan yang mendukung IKU Pemerintah Kota Banjarbaru oleh 8 (delapan) SKPD yang menjadi obyek penilaian maturitas;
- d. Inspektorat melaksanakan dan mendokumentasikan pemanfaatan penilaian risiko dan efektifitas pemantauan yang berkelanjutan.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang terkait sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya masih dirasakan kurang, Namun dalam hal ini sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk menunjang sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masing-masing program pada tahun 2018 efektif dan efisien, hal ini terlihat dari realisasi 7 (tujuh) program yang dilaksanakan rata-rata efisien sebesar 14,06%. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Indikator Nilai SAKIP

- a. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal

Indikator Nilai LPPD

- a. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Nilai Maturitas SPIP

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - Evaluasi Sistem pengendalian Internal Pemerintah.

Indikator Opini BPK

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
 - 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - 3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
 - 4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 - 5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 8. Kegiatan Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS

9. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang Daerah
 10. Kegiatan Percepatan Penyelesaian Masalah Aset
 11. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD)
 12. Kegiatan Penyusunan Data Standar Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD
 13. Kegiatan Penyusunan Barang Milik Daerah
 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan
 15. Kegiatan Rekonsiliasi Dana Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
 16. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
 17. Kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 18. Kegiatan Rekonsiliasi Persediaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota dengan SKPD
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 4. Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah
 6. Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.7.275.4366.950 telah direalisasi Rp. 6.252.806.287 sebesar atau 85,94% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Rp.146.422.900	Rp.62.842.900	42,92
2	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Rp.147.658.000	Rp.95.257.000	64,51
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.5.727.908.650	Rp.5.113.046.606	89,27
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.434.264.200	Rp.326.412.191	66,10
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.493.802.000	Rp.350.040.890	70,89
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	126.766.200	122.806.200	96,88
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.198.615.000	Rp.182.400.500	92,06.
Jumlah		Rp.7.275.4366.950	Rp. 6.252.806.287	85,94

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Indikator Nilai SAKIP

1. Penguatan Tim SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Melaksanakan Perubahan Data Cascading untuk semua SKPD
3. Melaksanakan Penandatanganan Komitmen pimpinan (fakta integritas SAKIP dan Perjanjian Kinerja)
4. Menghimpun rencana aksi dari SKPD
5. Melakukan Pembinaan per Tri Wulan terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkup SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru

Indikator Nilai LPPD

1. Dari sekretariat tim penyusun LPPD akan lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD terkait progress pembuatan laporan tahunan.
2. Memperkuat Tim penyusun LPPD, khususnya koordinasi pada level sekretariat dan pengolah data.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian IKK LPPD kepada semua SKPD.

Indikator Nilai Maturitas SPIP

1. Menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD sehingga dapat menjadi acuan untuk memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut;
3. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, online, real time sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (dashboard pimpinan) secara update dan efektif untuk pengambilan keputusan;

4. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi area of improvement (AOI);
5. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Memperbaiki materi dan skor maturitas dalam laporan self assessment maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai hasil QA.

Indikator Opini BPK

1. Melaksanakan Sensus barang milik daerah (BMD)
2. Melaksanakan Lelang terbuka barang milik daerah
3. Melakukan Pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD)
4. Menerapkan Pelayanan penerbitan SP2D online
5. Melaksanakan Belanja daerah non tunai
6. Menerapkan analisa standar belanja (ASB) yang terukur.

14. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terhadap setiap pelayanan di Unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Persepsi ini dapat menginterpretasikan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder pengguna layanan dalam pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Harapannya adalah agar seluruh unit penyelenggara pelayanan dapat lebih maju melayani kebutuhan dan respon dari masyarakatnya.

Dalam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM,
Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2018 dilaksanakan secara mandiri pada 51 (lima puluh satu) unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kelurahan, 5 (lima) Kecamatan, 7 (tujuh) Puskesmas, 1 (satu) Rumah Sakit, dan 21 (dua puluh satu) perangkat daerah lainnya.



Nilai Kepuasan Masyarakat Pada seluruh unit pelayanan publik Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut :

No.	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
		Tahun 2018	
1	2	3	4
1.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	90.59	Sangat Baik
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	88.41	Sangat Baik
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85.80	Baik
4.	SET. DPRD	85.19	Baik
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pelindungan Anak	84,44	Baik
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,29	Baik
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	83.73	Baik
8.	Dinas Sosial	83.70	Baik
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,00	Baik

10.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	82.51	Baik
11.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	82,18	Baik
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.65	Baik
13.	Dinas Kesehatan	81,05	Baik
14.	Dinas Perhubungan	80,83	Baik
15.	Rumah Sakit Daerah IDAMAN	79.65	Baik
16.	Inspektorat	79,32	Baik
17.	Dinas Lingkungan Hidup	78.82	Baik
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	78.65	Baik
19.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	78,61	Baik
20.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77,91	Baik
21.	Dinas Perdagangan	75,98	Kurang Baik
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.38	Kurang Baik
23.	Kecamatan Landasan Ulin	86.16	Baik
24.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	83.83	Baik
25.	Kecamatan Liang Anggang	81.58	Baik
26.	Kecamatan Cempaka	80.40	Baik
27.	Kecamatan Banjarbaru Utara	80.37	Baik
28.	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	88,96	Sangat Baik
29.	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	88.48	Sangat Baik
30.	Kelurahan Komet	88.42	Sangat Baik
31.	Kelurahan Palam	88.30	Baik
32.	Kelurahan Landasan Ulin Timur	87.90	Baik
33.	Kelurahan Sungai Ulin	87.63	Baik
34.	Kelurahan Guntung manggis	87,35	Baik
35.	Kelurahan Mentaos	87,01	Baik
36.	Kelurahan landasan Ulin Utara	86,78	Baik
37.	Kelurahan Loktabat Utara	85,89	Baik
38.	Kelurahan Sungai Besar	85,12	Baik
39.	Kelurahan Loktabat Selatan	83.89	Baik
40.	Kelurahan Syamsudin Noor	83,13	Baik
41.	Kelurahan Landasan Ulin Barat	83,02	Baik
42.	Kelurahan Guntung Payung	80.67	Baik
43.	Kelurahan Sungai Tiung	79,81	Baik

44.	Kelurahan Guntung Paikat	79,24	Baik
45.	Puskesmas Sungai Ulin	84,25	Baik
46.	Puskesmas Liang Anggang	83,22	Baik
47.	Puskesmas Banjarbaru Utara	81,33	Baik
48.	Puskesmas Landasan Ulin	79,95	Baik
49.	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	79,55	Baik
50.	Puskesmas Guntung Payung	78,86	Baik
51.	Puskesmas Guntung Manggis	78,55	Baik
52.	Puskesmas Sungai Besar	77,66	Baik
53.	Puskesmas Banjarbaru Selatan	76,88	Baik
Nilai Indeks Komposit Seluruh Unit Pelayanan Publik		82,45	Baik

Sumber: Laporan SKM Tahun 2018 dan hasil pengolahan kuesioner Tahun 2018

Adapun nilai rata-rata persepsi hasil IKM bagi Unit Penyelenggara Pelayanan di Kota Banjarbaru sebesar **82,45** dengan mutu pelayanan “**B**” dengan kinerja pelayanan **Baik**.

Dari nilai sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat indeks kepuasan masyarakat dari unsur pelayanan yaitu sebagai berikut :

Nilai Gabungan Rata- Rata Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat



Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik (83,29)	Sangat Baik	Sangat Baik (82.45)	100%	Sangat Baik (100)	-
Capaian Kinerja							100%		

Realisasi Indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2018 ditargetkan Mutu sangat baik terealisasi sangat baik (82,45). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 100% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” tahun 2018 adalah 82,45 (mutu sangat baik) namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 83,29 terjadi penurunan sebesar 0,84. Hal ini dikarenakan jumlah SKPD yang di survei berbeda antar Tahun 2017 dengan Tahun 2018.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” tahun 2018 adalah 82,45 (mutu sangat baik) sudah sama dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu mutu sangat baik

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat target nasional pada indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

1. Pengumpulan data sudah berbasis aplikasi yang bisa diproses masing-masing SKPD, sehingga memudahkan pengelolaan data dan penentuan hasil secara akurat.
2. Masih kurangnya pemahaman pemangku kepentingan pada unit penyelenggara pelayanan publik akan apa yang akan dicapai pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat .

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur pelayanan yang menangani kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kegiatan masih dirasakan kurang, Namun dalam hal ini sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk menangani kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 efektif dan efisien hal ini terlihat dari realisasi program yang dilaksanakan efisien sebesar 5,82%. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal terhadap pelayanan publik.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

1. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.81.526.400 telah direalisasi Rp.76.764.400 sebesar atau 94,18% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Rp.81.526.400	Rp.76.764.400	94,18
Jumlah		Rp.81.526.400	Rp.76.764.400	94,18

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Melaksanakan Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai dengan memberikan training dan atau bimbingan teknis pelayanan prima secara berkala
2. Menyiapkan dukungan keuangan melalui penganggaran khususnya terkait dengan sarana prasarana maupun penunjang pelayanan
3. Meninjau dan menelaah kembali prosedur dan persyaratan untuk menjamin kemudahan persyaratan dan prosedur pelayanan
4. Mempublikasikan informasi Pelayanan dan Standar Pelayanan di unit/ ruang pelayanan, area pemerintahan, ruang publik, media informasi (baliho/ billboard), media cetak, website, Media Online, Media Sosial maupun di ruang publik
5. Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang serta mempertimbangkan untuk memberikan reward/ penghargaan kepada unit pelayanan yang sudah melaksanakan pelayanan dengan sangat baik.

15.	SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah, Akses dan Kualitas Layanan informasi Publik dengan menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi
-----	--

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi SPBE, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat $< 1,8$ = kurang, $1,8 - < 2,6$ = cukup, $2,6 - < 3,5$ = baik, $3,5 - < 4,2$ = sangat baik dan $4,2 - < 5,0$ = memuaskan. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dievaluasi mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah melakukan evaluasi mandiri terhadap indeks SPBE, sebagaimana berikut :

Domain	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Tingkat Kematangan Evaluasi mandiri	Skor
1	2	3	4	5	6
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE			17	2.35	
	Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		7	2.43	

		Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1	0	0
		Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1	0	0
		Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1	4	0.04
		Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1	3	0.03
		Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1	3	0.03
		Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1	4	0.04
		Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1	3	0.03
	Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE		10	2.3	
		Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1	2	0.02
		Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1	0	0
		Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1	2	0.02
		Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	1	3	0.03
		Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1	0	0
		Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	1	5	0.05
		Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1	3	0.03
		Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	5	0.05
		Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1	0	0
		Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	1	3	0.03
Domain 2 Tata Kelola SPBE			28	1.71	

	Aspek 3 Kelembagaan		8	0	
		Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	4	0	0
		Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	4	0	0
	Aspek 4 StrategidanPerencanaan		8	3	
		Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4	3	0.12
		Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK	4	3	0.12
	Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi		12	2	
		Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data	4	1	0.04
		Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi	4	2	0.08
		Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4	3	0.12
Domain 3 Layanan SPBE			55	2.62	
	Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		35	2.43	
		Indikator 25 Layanan Naskah Dinas	5	2	0.10
		Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian	5	2	0.10
		Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan	5	4	0.20
		Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran	5	3	0.15
		Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan	5	3	0.15
		Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja	5	0	0.00
		Indikator 31 Layanan Pengadaan	5	3	0.15
	Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik		20	2.83	
		Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik	3.33	3	0.10
		Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi	3.33	2	0.07

		Hukum			
		Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System	3.33	0	0.00
		Indikator 35-1 Layanan Publik Instansi Pemerintah (Aplikasi Perijinan Intan BJB)	3.33	5	0.17
		Indikator 35-2 Layanan Publik Instansi Pemerintah (SIM-PBB)	3.33	4	0.13
		Indikator 35-3 Layanan Publik Instansi Pemerintah (SPSES v4.3)	3.33	3	0.10
Total					2.30

Pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah, Akses dan Kualitas Layanan informasi Publik dengan menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Indeks SPBE	Nilai	1,38	1,38	1,80	2,30	127.77	2,75	-
Capaian Kinerja							127,77%		

Realisasi Indikator sasaran "Indeks SPBE" pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1,80 terealisasi 2,30. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 112,17% dengan kategori Baik Sekali

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator "Indeks SPBE" tahun 2018 adalah 2,30 namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,38 terjadi kenaikan sebesar 0,92

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Indeks SPBE” tahun 2018 adalah 2,30 namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 2,75 masih tersisa 0,45.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat target nasional pada indikator “Indeks SPBE”

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Berdasarkan evaluasi SPBE, maka penyebab keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adalah :

1. Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE pemerintah kota banjarbaru yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Adanya edaran nomor :100/0143/Pem/Setdako tahun 2018 tentang distribusi surat undangan, laporan dan urusan kedinasan lainnya pada email resmi pemerintah kota banjarbaru yang menjelaskan fungsi email dinas sebagai sarana surat menyurat kedinasan pada pemerintah kota Banjarbaru.
3. Adanya masterplan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan TIK kota Banjarbaru.
4. Telah dibangunnya infrastruktur jaringan kota banjarbaru menggunakan kabel FO dan radio yang menghubungkan SKPD dan kelurahan se kota Banjarbaru.
5. Adanya tim verifikasi belanja TIK kota Banjarbaru yang memverifikasi anggaran belanja SKPD sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK di setiap SKPD kota Banjarbaru dapat selaran dengan masterplan TIK.
6. Telah diterapkannya aplikasi pengaduan secara elektronik yaitu LAPOR! sebagai kanal pengaduan masyarakat yang dapat ditangani secara

cepat oleh dinas terkait melalui admin lapor dan pejabat penghubung masing-masing SKPD.

7. Telah diterapkannya pengadaan belanja barang dan jasa secara elektronik menggunakan aplikasi SPSE v.4.3.
8. Semakin meningkatnya kesadaran akan penggunaan TIK oleh SKPD untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada warga kota Banjarbaru salah satunya PPID
9. Adanya sharing penggunaan aplikasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
10. Adanya MoU dengan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya untuk pemakaian dan/ atau pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah
11. Pelaksanaan proyek perubahan oleh peserta Diklat PIM yang mengacu pada penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya juga menjadi factor penentu dalam keberhasilan penerapan e-government di SKPD.

Sedangkan faktor penyebab yang berpengaruh signifikan terhadap kegagalan adalah :

1. Belum optimalnya penerapan kebijakan perwali nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dibidang TIK.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan insfrastruktur TI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang tersedia (website kota dan website SKPD) oleh SKPD dalam mempublikasikan informasi.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan kemampuan Sumberdaya aparatur yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penunjang SPBE masih dirasakan kurang, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi

jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang TIK masih dirasakan kurang dan memerlukan sumber daya dengan keahlian teknis yang mendukung SPBE untuk meningkatkan realisasi target yang telah ditetapkan.

b. Sumber daya anggaran.

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penunjang SPBE masing-masing pada tahun 2018 efektif dan efisien hal ini terlihat dari realisasi 4 (empat) program yang dilaksanakan rata-rata efisien sebesar 8,5%. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

a. Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perumusan Regulasi, kebijakan dan movev di bidang nama domain, sub domain, serta website dan konten

b. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyelenggaraan infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi

- c. Program Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemantau Isu Publik, Pendapat umum dan Aduan Masyarakat
- d. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pelayanan Permintaan Informasi Publik

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah, Akses dan Kualitas Layanan informasi Publik dengan menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.581.644 .370 telah direalisasi Rp.1.507.816.829 sebesar atau 91,15% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah	483.613.700	448.467.260	90
2	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	5.767.918.880	5.507.855.156	76
3	Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000	100
4	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	35.044.900	3.944.900	100
Jumlah		Rp.1.581.644 .370	Rp.1.507.816.829	91,5

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki dengan membangun komitmen dan dedikasi dari semua sumber daya aparatur yang jumlah dan kualitas saat sekarang ini untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Meningkatkan kemampuan / kompetensi sumber daya manusia TIK yang ada melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh kementerian terkait atau lembaga-lembaga pelatihan resmi melalui kerja sama dengan BKPP kota Banjarbaru.
3. Melakukan peningkatan kemampuan/ kompetensi TIK sumber daya manusia di SKPD se kota banjarbaru bekerja sama dengan BKPP kota Banjarbaru.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan semua SKPD terkait karena tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hampir disetiap kegiatan/program ada yang tergantung dari sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait instansi diluar (eksternal) organisasi.

16. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

Penegakan perda merupakan kegiatan pengejawantahan dari tindakan sebagai rangkaian untuk menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri dari masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah

Adapun data temuan pelanggaran perda dan yang ditindaklanjuti serta diselesaikan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PELANGGARAN	TERSELESAIKAN	JUMLAH KASUS
1.	Bolos sekolah	1	1
2.	PKL	53	55
3.	Reklame	75	79
4.	Miras	18	18
5.	PSK	16	16
6.	Bangunan dibahu jalan	10	15
7.	Hiburan umum karaoke	2	2
8.	Sumbangan tanpa izin	2	2
9.	HO	4	5
10.	Pak Ogah	10	16
11.	Parkir liar	1	1
12.	Anak punk	3	3
13.	Ceceran tanah	3	3
14.	ODGJ	2	2
15.	Kost	12	14
16.	Mesum	2	2
17.	Gepeng	3	3
18.	Penebangan pohon	-	2
19.	Kandang ayam	-	1
JUMLAH		217	240

Indikator Jumlah Penanganan Konflik

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa yang disebut dengan konflik adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional di daerah serta menghambat pembangunan.

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Beranjak dari definisi konflik tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa diwilayah Kota Banjarbaru selama tahun 2018 kondisinya dalam keadaan tidak terjadi konflik (zero conflict), terutama konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan antar golongan ataupun berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

Pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatkan Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat diukur dari 2 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	%	60,00	60,00	70,00	90,00	128,5	100,00	-
2.	Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0	0	0	0	100	0	-
Rata-Rata Capaian Kinerja							114,25%		

Realisasi Indikator sasaran “Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 70% tercapai 128,5% dengan kategori Baik Sekali sedangkan Realisasi Indikator sasaran “Jumlah Kasus Konflik” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0 kasus tercapai 100% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja tahun 2018 telah tercapai 114,25% dengan kategori Baik Sekali .

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

Realisasi kinerja indikator “Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada” tahun 2018 adalah 90% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 60% terjadi kenaikan sebesar 30%.

Indikator Jumlah Kasus Konflik

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Kasus Konflik” tahun 2018 adalah 0 kasus namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0 kasus tidak mengalami perubahan. Hal ini diartikan bahwa di wilayah Kota Banjarbaru tetap tercipta situasi atau kondisi kondusif (aman, nyaman dan tertib) selama tahun 2017 dan 2018, dimana tidak timbul kejadian/ peristiwa konflik seperti kejadian / peristiwa :

1. Konflik sosial atau kerusuhan yang dipacu oleh latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
2. Tindakan-tindakan yang bersifat pengrusakan-pengrusakan fasilitas Negara atau umum yang anarkis.
3. Peristiwa-peristiwa terorisme dan radikalisme.
4. Kejadian/ peristiwa yang mengganggu stabilitas politik, antara lain :
 - a. Disharmonisasi kepala Daerah dengan DPRD; dan
 - b. Demonstrasi/ unjuk rasa yang masif, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Meskipun pada tahun 2018 situasi dan kondisi Kota Banjarbaru tidak ada kejadian/ peristiwa konflik sebagaimana tersebut diatas yang berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah dan menghambat aktifitas pembangunan di Kota Banjarbaru, namun tidak dapat dipungkiri sama halnya dengan kondisi tahun 2016 dan 2017 yang lalu, pada tahun 2018 ini juga masih ada kejadian atau peristiwa yang berpotensi ke arah konflik meskipun tidak bersifat masif, yaitu yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kerukunan umat beragama berupa penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah, yakni :

1. Tindak lanjut dari penyelesaian kesepakatan perselisihan pendirian rumah ibadah gereja Advent Hari ketujuh di jalan kerinci Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
2. Rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat di rumah Sdr. Parlin Jalan A.Yani Km.30,2 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin.
3. Rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat di rumah Pendeta Elisa Christano, Jalan Kurnia Gang Mangga RT 6 RW 3 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

Realisasi kinerja tahun 2018 dibanding dengan target jangka menengah telah tercapai 128,5% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100% masih tersisa 10% dan akan tercapai pada akhir target realisasi kinerja pada Tahun 2021 bahkan tidak menutup kemungkinan akan melampaui target

Indikator Jumlah Kasus Konflik

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Kasus Konflik” tahun 2018 sudah terealisasi sebagaimana target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu 0 kasus, dan diharapkan terus menjaga tidak terjadinya konflik (zero conflict)

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat Target Nasional pada indikator “Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada” dan “Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada dan Jumlah Kasus Konflik” .

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

1. Tersedianya anggaran sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik
2. Adanya komitmen SKPD Satpol PP untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang masih ada.
3. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan pada SKPD terkait terutama dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Selain tersedianya Sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Indikator Jumlah Kasus Konflik

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian kinerja penanganan konflik, terutama pada tataran penanganan pencegahan, maka penyebab keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adalah :

1. Efektifitas kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam rangka :
 - a. Peningkatan kapasitas pencegahan kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM melalui deteksi dini

- b. Peningkatan pengamalan dan pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara serta kerukunan dan toleransi antar agama dan etnis
 - c. Peningkatan pembangunan politik yang demokratis, santun dan beretika
- 2. Terlaksananya dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta pemberdayaan forum-forum kemitraan dan kerjasama (FKDM, FKUB dan FPK serta dengan kalangan ormas dan kepemudaan lainnya).
- 3. Memaksimalkan fungsi dan peranan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kota Banjarbaru tahun 2018 dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan peringatan dini serta alternatif cara bertindak dan tukar menukar informasi intelijen
- 4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi politik daerah dan stabilitas politik pemerintahan, yang dilaksanakan secara terpadu dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan agar keberadaan dan aktifitasnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta menghindari keberadaan ormas-ormas yang dapat meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta merongrong NKRI
- 5. Terlaksananya pemantauan dan monitoring kegiatan-kegiatan atau peristiwa/ kejadian yang bersifat insidentil yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan stabilitas daerah
- 6. Memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan SKPD-SKPD dan instansi vertikal terkait sampai ke tingkat paling bawah mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan.

Sedangkan faktor penyebab yang berpengaruh signifikan terhadap kegagalan adalah :

1. Kurang maksimalnya proses rekrutmen peserta sosialisasi/ pelatihan, sehingga banyak sasaran peserta yang mengikuti tidak sesuai yang diharapkan, baik dalam sisi kapasitasnya maupun jumlahnya.
2. Belum optimalnya efektifitas dari materi dan metode yang disampaikan pada sosialisasi-sosialisasi.
3. Bentuk atau model pelatihan/ sosialisasi yang diterapkan kurang komunikatif termasuk pula kelompok-kelompok segmentasi sasaran sosialisasi/pelatihan

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

1. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru masih kurang jadi dibutuhkan pelatihan dan keterampilan agar dapat dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru 66 orang, tenaga kontrak 63 orang dan PTT 1 orang. Dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang terlatih di satpol PP Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota banjarbaru dapat melaksanakan kegiatan dan mencapai target yang sesuai dengan Perjanjian kinerja terhadap walikota Banjarbaru.
2. Sumber Daya Anggaran, Program dan kegiatan pada Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota terlaksana efisien dengan anggaran Rp.329.945.400,- dengan serapan anggaran 320.545.400,-

Indikator Jumlah Kasus Konflik

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya aparatur yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan konflik sebanyak 16 orang, masih kurang baik dari jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya

keahlian intelijen dalam melaksanakan deteksi dini maupun koordinasi. Dengan keadaan sumber daya aparatur tersebut program dan kegiatan penanganan konflik dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

b. Sumber daya anggaran.

Program dan kegiatan pada penanganan konflik dapat terlaksana dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 91.529.406,- atau 13,77% dengan serapan anggaran Rp. 664.636.494,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 756.165.900,-. Diharapkan kedepan masih perlu penambahan dan pembenahan anggaran agar menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta maksimal terhadap penanganan konflik.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

a. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota :

1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Penertiban perizinan
2. Pengawasan Potensi pelanggaran Perda dan Perkada
3. Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali

Indikator Jumlah Kasus Konflik

a. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Pengendalian Keamanan lingkungan
2. Pemantauan Keg Orang Asing, LSM / NGO dan Lembaga. Asing
3. Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Pemerintah

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Sosialisasi Pendidikan wawasan kebangsaan
2. Sosialisasi peningkatan kesadaran bela Negara
3. Gugus Tugas Revolusi Mental

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat,

- Kegiatan Monev dan Pelaporan

- d. Program. Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.756.165.900 telah direalisasi Rp.664.636.494 sebesar atau 87,90 % dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.382.437.600	Rp.334.436.400	87,45
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.262.538.100	Rp.226.628.894	86,32
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 24.019.000	Rp.18.019.000	75,02
4	Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Rp.87.171.200	Rp.85.552.200	98,14
5	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Rp. 329.945.400	Rp. 320.545.400	
Jumlah		Rp.756.165.900	Rp.664.636.494	87,90

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada

1. Lebih giat lagi dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat yang tertib dan aman sehingga terciptanya kondisi masyarakat Banjarbaru yang aman,nyaman dan tertib

2. Lebih memaksimalkan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal ketaatan terhadap pelaksanaan perda dan perkara

Indikator Jumlah Kasus Konflik

1. Memberdayakan segala potensi yang ada dan/ atau yang dimiliki dengan memprioritaskan membangun komitmen dan dedikasi serta integritas yang tinggi dari semua sumber daya aparatur yang jumlah dan kualitas saat sekarang ini masih kurang memadai untuk peningkatan produktifitas kinerjanya.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan semua instansi/ SKPD terkait, forum-forum, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta elemen-elemen kemasyarakatan lainnya. Karena tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hampir disemua kegiatan/ program sangat/ atau selalu tergantung dari sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait instansi diluar (eksternal) organisasi.
3. Melaksanakan penataan dan konsolidasi terhadap unsur penentu utama terhadap efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan kegiatan/program, yaitu penataan dan pembaharuan serta penguatan pada basis data dan informasi potensi rawan konflik, ormas/LSM, rawan partisipasi politik dan data/ informasi lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan sasaran-sasaran strategis dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai petunjuk ataupun pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Mengingat tahun 2019 yang akan datang adalah tahun politik, maka diperlukan adanya penambahan kegiatan-kegiatan yang lebih fokus pada peningkatan partisipasi politik dan peningkatan pencegahan dan penanganan potensi konflik yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan umum.

17. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja sasaran “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat” dipilih dengan maksud yaitu untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan menanggulangi bencana dan pada saat tanggap darurat bencana.

Kejadian bencana pada tahun 2018 terjadi 253 kejadian bencana yang terdiri dari 27 bencana kebakaran yang dapat ditangani oleh UPTD Kebakaran Kota Banjarbaru yang mengakibatkan, antara lain :

- a. Rumah : 13 buah
- b. Gedung sekolah: 2 bilik kelas
- c. Gudang terbakar: 5 buah
- d. Bengkel : 1 buah
- e. warung atau kios : 3 buah
- f. Kamr Kost : 2 buah
- g. Pondok kecil : 1 buah.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 sebanyak 226 kali peristiwa yang terjadi pada beberapa kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Syamsudin Noor
2. Kelurahan Landasan Ulin Timur
3. Kelurahan Landasan Ulin Selatan
4. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
5. Kelurahan Sungai Ulin
6. Kelurahan Sungai Tiung
7. Kelurahan Cempaka
8. Kelurahan Guntung Paikat
9. Kelurahan Guntung Manggis
10. Kelurahan Loktabat Selatan
11. Kelurahan Loktabat Utara
12. Kelurahan Kemuning
13. Kelurahan Palam
14. Kelurahan Guntung Payung.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru dapat tertangani dengan baik, dengan mengerahkan Unit Pasukan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarbaru, disertai dukungan dan kerjasama dari Unit Pemadam Kebakaran swasta/masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru, namun ada sebagian kejadian bencana yang tidak tertangani sesuai waktu tanggap (15 menit) \pm 37 kejadian karena sulitnya untuk menjangkau titik kejadian dikeranekan akses jalan yang terbatas.

Pada tahun 2018 juga terjadi 3 (tiga) kali peristiwa angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Landasan Ulin Utara, dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan menyebabkan kerusakan rumah dan berdampak pada 97 jiwa, serta terjadi 5 (lima) kali peristiwa banjir yang terjadi di Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Kemuning.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana diukur dari 1 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	82,00	82,00	85	85	100	95	-
Capaian Kinerja							100%		

Realisasi Indikator sasaran “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat” pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% terealisasi 85% . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 telah tercapai 100% dengan kategori Baik.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat” tahun 2018 adalah 85% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 82% terjadi kenaikan sebesar 3%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat” tahun 2018 adalah 85% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 95% masih tersisa 10%.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat Target Nasional pada indikator “Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat”.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

1. Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bencana ke 5 Kecamatan
2. Terciptanya pelopor (relawan) dalam pencegahan kebakaran hutan/lahan, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung ditingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Banjarbaru
3. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
4. Dapat ditindak lanjutnya kejadian bencana sesuai waktu tanggap
5. Tersedianya peta rawan bencana
6. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
7. Tersedianya jalur evakuasi apabila terjadi bencana dengan skala besar.
8. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam
9. Terdatanya jumlah logistik yang keluar maupun yang masuk

10. Kurang tersedianya alat-alat pemadam kebakaran (pemadam mini, pompa gendong).
11. Belum tersedianya SDM yang handal menangani Sistem Informasi Geografis
12. Pelatihan teknis SDM yang kurang terhadap Sistem Informasi Geografis dan pemetaan.
13. Munculnya Bencana tidak bisa diprediksi.
14. Jumlah karyawan dan relawan yang sangat sedikit tidak sesuai dengan jumlah bencana yang terjadi
15. Masih kurang nya kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam penanganan bencana
16. Belum adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparaturnya yang menangani penanggulangan bencana, maka dapat dikemukakan bahwa baik dalam sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kebijakan pendidikan masih dirasakan kurang, Namun dalam hal ini sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. Sumberdaya Anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk menangani penanggulangan bencana masing-masing program pada tahun 2018 efektif dan efisien hal ini terlihat dari realisasi 5 (lima) program yang dilaksanakan rata-rata efisien sebesar 1,41%. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar kedepannya anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana

- Kegiatan Pengadaan prasarana dan prasarana evakuasi
 - Kegiatan Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana
 - Kegiatan Simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan korban bencana
2. Program Penanganan tanggap darurat bencana
- Kegiatan Pengerahan SDM dan logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana
 - Kegiatan Pos komando siaga bencana
3. Program Pasca Bencana
- Kegiatan Pendataan dampak kejadian bencana
 - Kegiatan Pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan rekontruksi

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana diukur tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.886.147.300 telah direalisasi Rp.873.727.000 sebesar atau 98,59% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	436.085.300	434.571.00	99,65
2	Program Penanganan tanggap darurat bencana	403.654.000	388.283.000	96,19
3	Program Pasca Bencana	46.908.000	40.873.000	87,13
Jumlah		Rp. 886.147.300	Rp. 873.727.000	98,59

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Rencana tindak lanjut untuk mencapai sasaran strategis pada tahun berikutnya:

1. Melakukan rapat koordinasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan tingkat kota antara pemerintah Kota Banjarbaru, Polres Banjarbaru

dan Kodim Martapura dengan seluruh pemangku kepentingan diwilayah Kota Banjarbaru.

2. Melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang terdapat lahan kosong dan hutan disetiap rukun tetangga (RT) per Kelurahan dan kecamatan.
3. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat diwilayah yang memiliki potensi kebakaran agar memiliki rasa kepedulian terhadap pencegahan kebakaran.
4. Memasang Baleho, spanduk dan siaran radio yang berisi peringatan, ajakan dan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama peduli melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
5. Menetapkan prosedur tetap (protap) tindakan pemadam kebakaran lahan hutan.
6. Menetapkan alat dan jalur komunikasi bagi pihak pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran agar informasi dapat tersampaikan dengan cepat kepada pihak pengambil keputusan (Komando).
7. Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat diwilayah yang memiliki potensi kebakaran tentang bagaimana upaya/tindakan dalam menangani apabila terjadi kebakaran lahan/hutan baik yang masih kecil atau yang sudah mulai besar.
8. Melakukan pendataan sumberdaya yang ada dimasyarakat diwilayah yang berpotensi kebakaran baik sumberdaya manusia maupun peralatan yang dimiliki untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran.
9. Melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran lahan dan hutan yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat.
10. Mendirikan posko diwilayah RT yang memiliki potensi kebakaran lahan dan hutan.
11. Merekrut potensi/relawan.
12. Melakukan latihan simulasi terjadinya kebakaran hutan yang melibatkan seluruh komponen dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan.

13. Melakukan piket di posko oleh relawan secara bergiliran dengan tugas melakukan patrol pada waktu-waktu tertentu untuk mengawasi kawasan lahan atau hutan yang ada diwilayahnya dari kemungkinan adanya kebakaran.

18.	SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin Berdasarkan Data Terpadu
-----	---

Indikator Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Seorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS Dikota Banjarbaru berjumlah 22 PMKS, untuk penanganan yang dilakukan di Tahun 2018 sebanyak 20 PMKS. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS.

Indikator Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu

Masyarakat miskin yang termasuk dalam Data Terpadu yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan. Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Banjarbaru sebanyak 10.780 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Sedangkan Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Banjarbaru sebanyak 6.525 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Pencapaian sasaran Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin Berdasarkan Data Terpadu diukur dari 2 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	TARGET RPJMD 2021	TARGET RPJMN
					TARGET	REALISASI			
1.	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	50	59	91	154,24%	68,00	84,6
2.	Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu	%	60,03	60,03	60,03	60,52	100,82 %	60,03	-
Capaian Kinerja							127,53%		

Realisasi Indikator sasaran "Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 59 % tercapai 154,24% dengan kategori Baik Sekali, sedangkan Realisasi Indikator Sasaran "Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu" pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 60,03 tercapai 100,82. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 127,53% dengan katagori baik sekali.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja indikator "Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" tahun 2018 adalah 91% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 50% terjadi peningkatan sebesar atau 41% sedangkan Realisasi kinerja indikator "Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu" tahun 2018 adalah 60,52% namun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 60,03% terjadi peningkatan sebesar 0,49.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Realisasi kinerja indikator “Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” tahun 2018 adalah 91% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 68,00 sudah melebihi target sebesar 23% sedangkan Realisasi kinerja indikator “Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu” tahun 2018 adalah 60,52% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 60,03% juga sudah melebihi target sebesar 0,49%.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN STANDAR NASIONAL

Realisasi kinerja indikator “Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” tahun 2018 adalah 91% namun dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 84,6% masih sudah melebihi target sebesar 6,4%.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat terlaksana didukung dengan :

1. Adanya Komitmen Kepala Dinas Sosial dan aparatnya khususnya bagi Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam penanganan PMKS
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS
4. Dibangunnya Rumah Singgah untuk penampungan sementara bagi PMKS
5. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak dalam penanganan PMKS

Sedangkan untuk Cakupan Penanganan Masyarakat Miskin Berdasarkan Data Terpadu, dapat didukung dengan :

1. Pembagian Rastra kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) sesuai Kouta yang sudah ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru Sesuai Jumlah KPM d Kelurahan se Kota Banjarbaru
2. Adanya kerjasama dengan Bulog Devisi Regional Kalimantan (MoU) dengan pemerintah Kota Banjarbaru
3. Rastra yang dibagikan adalah gratis tanpa biaya tebus.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Capaian tersebut diperoleh dengan efesiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlibat.

1. Cakupan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut :
 - a. 5 orang ASN yang seharusnya 9 orang ASN
 - b. 3 orang Tenaga Kontrak
 - c. 1 orang PTT
 - d. 6 orang Pramu Sosial yang seharusnya 10 orang (yang melayani klien yang masuk di rumah singgah dari berbagai jenis PMKS)
2. Cakupan Penanganan Penduduk Miskin Berdasarkan Data terpadu sebagai berikut:
 - a. 7 orang ASN yang seharusnya 10 orang ASN
 - b. 2 orang Tenaga Kontrak
 - c. 2 Orang Operator

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi anak terlantar dan keluarga miskin.
 - kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan,
 - Kegiatan Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat,

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS, Pengumpulan, Pengolahan Data, Ekspose dan Pelaporan.
- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi para Lanjut Usia (Lansia), Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba, Pembinaan dan Rehabilitasi para gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar, Pembinaan dan Pelatihan bagi Anak Jalanan.
- 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma
- 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Kegiatan Pelaksanaan Rumah Aman dan kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah.
- 5. Program Perlindungan Sosial
 - Kegiatan Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras Untuk Keluarga Miskin.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin Berdasarkan Data Terpadu diukur tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.679.293.860 telah direalisasi Rp.2.679.293.860 sebesar atau 64,13% dengan rincian per program sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.205.090.800	970.908.800	80.57

2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	243.634.700	189.689.700	77,86
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	89.100.100	14.570.000	16,35
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	419.287.300	290.839.629	69,36
5.	Program Perlindungan Sosial	275.632.000	210.940.400	76,53
Jumlah		Rp.2.679.293.860	Rp.2.679.293.860	64,134

LANGKAH DI MASA MENDATANG

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional dalam melaksanakan layanan kepada PMKS melalui pelatihan teknis.
2. Kota Banjarbaru adalah kota yang sedang berkembang dan merupakan daerah transit oleh karenanya sangat rentan terhadap persoalan sosial dan perlu penanganan secara konperihensip agar pertumbuhan PMKS dapat teratasi
3. Perlu inovasi program yang tepat untuk membantu layanan kepada PMKS agar PMKS tidak hanya dilayani atau mendapat subsidi akan tetapi dapat mandiri.
4. Perlu penambahan kelengkapan sarana dan prasarana mobilitas untuk pelayanan kepada PMKS.
5. Meningkatkan Koordinasi dan segera mengisi Pelaksanaan kegiatan terutama dengan stok leader dari instansi terkait
6. Memperkuat basis data terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memverifikasi pembuatan data tersendiri untuk

Pemerintah Kota Banjarbaru / Dinas Sosial sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan bidang Penanganan Kesejahteraan sosial.

7. Memperkuat Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan bimtek untuk profesionalisme pelaksanaan kegiatan
8. Memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk PMKS
9. Melakukan penambahan Anggaran untuk pemberdayaan PMKS dan Keluarga miskin

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.007.157.442.545. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal, maka kebijakan umum keuangan/ anggaran diarahkan dalam 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diverifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Banjarbaru lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian tabel sebagai berikut :

URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	204.642.528.120	229.786.672.728,92	112%
Pendapatan Pajak Daerah	107.665.274.440	130.839.282.034.	122%
Hasil Retribusi Daerah	10.972.510.000	8.186041683	75%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.930.169.865	7.930.169.861	100%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.074.573.815	82.831.179.150,92	106%
DANA PERIMBANGAN	688.403.776.590	728.790.689.110	106%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	104.274.489.000	146.446.620.267	140%
Dana Alokasi Umum	428.542.067.000	428.542.067.000	100%
Dana Alokasi Khusus	155.587.220.590	153.802.001.843	99%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.111.137.835.00	128.756.617.166	113%
Pendapatan Hibah	25.694.585.535	27.005.324.013	105%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.666.552.300	93.001.293.153	117%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.750.000.000	8.750.000.000	100%
	1.117.675.602.945	1.035.577.164.814.80	93%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	431.017.542.585	413.322.488.370	96%
Belanja Pegawai	408.684.550.395	395.876.080.416	97%
Belanja Hibah	15.739.710.940	15.031.208.840	95%
Belanja Bantuan Sosial	1.747.281.250	1.321.980.000	76%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.046.000.000	1.045.457.922	100%
Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	47.761.192	1%
BELANJA LANGSUNG	686.658.060.360	622.254.67.444.80	91%
Belanja Pegawai	38.274.045.000	36.218.195.406	95%
Belanja Barang dan Jasa	329.157.568.423	304.607.814.487.99	93%
Belanja Modal	319.226.446.937	281.428.666.550.81	88%
	110.518.160.400	118.018.160.400.06	107%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	118.018.160.400	118.018.160.400	100%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.018.160.400	118.018.160.400	100%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000	7.500.000.000	100%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	100%

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.087.333.979.004,92 dari target Rp. 1.007.157.442.545 dengan capaian 108%. Adapun yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah tercapai 112%, Lain-lain PAD yang sah dapat terealisasi sebesar Rp. 128.756.617.166 dari target Rp. 114.111.137.835,00 dengan capaian 113% serta Dana perimbangan di targetkan sebesar Rp. 688.403.776.590 terealisasi sebesar Rp. 728.790.689.110,00 atau 106%.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 bahwa. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat,

sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam *Belanja Operasi*, *Belanja Modal*, *Belanja Tidak Terduga* yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat. Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.117.675.602.945	1.035.577.164.814.80	90,97
BELANJA TIDAK LANGSUNG	431.017.542.585	413.322.488.370	93,31
Belanja Pegawai	408.684.550.395	395.876.080.416	88,13
Belanja Hibah	15.739.710.940	15.031.208.840	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.747.281.250	1.321.980.000	100
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.046.000.000	1.045.457.922	88,50
Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	47.761.192	91,96
BELANJA LANGSUNG	686.658.060.360	622.254.676.444.80	90,89
Belanja Pegawai	38.274.045.000	36.218.195.406	94,38
Belanja Barang dan Jasa	329.157.568.423	304.607.814.487.99	27,95
Belanja Modal	319.226.446.937	281.428.666.550.81	
	1.117.675.602.945	1.035.577.164.814.80	91,94

Sumber Data : BPKAD Kota Banjarbaru 2018

Berdasarkan tabel diatas Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 1.035.577.164.814,80 dari target Rp 1.117.675.602.945 dengan capaian 93%, dengan demikian terdapat penghematan terhadap belanja sebesar Rp 82.098.438.130,20.

KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi dan profitabilitas
- 2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk giro/ deposito, penyertaan modal atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan
- 3) Apabila APBD dalam keadaan deficit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam **Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	118.018.160.400.00	118.018.160.400.00	100%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.018.160.400.00	118.018.160.400.00	100%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000.000	7.500.000.000	100%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	100%

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1) Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD
- 2) Belum semua SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran
- 3) Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia
- 4) Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah

b. Solusi

- 1) Perlunya kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD
- 2) Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna di alokasikan ke belanja modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendorong efisiensi dan efektifitas pembangunan
- 4) Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Banjarbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 18 sasaran strategis yang mencakup 28 indikator sasaran, diketahui bahwa 17 indikator sasaran atau 60,7% Baik Sekali dan 11 indikator sasaran atau 39,28% Baik. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 113,27% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 adalah Baik Sekali.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dan target kinerja. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai makhluk Tuhan, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Banjarbaru, 25 Maret 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

PENGUKURAN KINERJA

Kota : BANJARBARU
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA (%)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia							
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,77	10,77	100
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,91	14,78	99,93
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	100,15	79,00	126,77
		4.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	5,50	2,00	275,00
Misi 2 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan							
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas Antar Wilayah	5.	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	97,39	96,12	98,69
4.	Meningkatnya Penanganan Kawasan Rawan Banjir	6.	Persentase Berkurangnya Kawasan Rawan banjir	%	50,00	50	100
5.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	7.	Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh	%	99,22	99,53	100,31
		8.	Persentase Rumah Layak Huni	%	99,58	99,53	99,95

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA (%)
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,39	67,73	102
7.	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	10.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	10,26	10,43	101,65
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan dan Peluang Kewirausahaan							
8.	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	11.	Persentase wirausaha baru	%	19,04	19,31	101,42
		12.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	76.800	99.973	130
		13.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,15	5,53	110,08
9.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	%	188,60	228,53	121,17
10.	Meningkatnya Investasi	15.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp. Milyar)	Rp.	1.556,60	1.630,45	104,74
11.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	16.	Persentase Pasar Tradisional Yang Dikelola Secara Modern	%	40	40	100
12.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	17.	Ketersediaan Pangan Daerah	Skor PPH	81,00	81,93	102,29

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA (%)
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	18.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B (63,28)	100
		19.	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi (3.05)	101
		20.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		21.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,05	3,06	100,3
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Sangat baik	Sangat Baik (82,45)	100
15.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	23.	Indeks SPBE	%	1,80	2,30	127,77

Misi 5 :

Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib

16.	Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	70	90	128,5
		25.	Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0	0	100
17.	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	26.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%	85	85	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA (%)
18.	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu	27.	Cakupan Penanganan PMKS	%	59	91	154,24
		28.	Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu	%	60,03	60,52	100,82

**PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KOTA BANJARBARU
DARI KEMENTRIAN ATAUPUN ORGANISASI NON PEMERINTAH
TAHUN 2018**

No	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat B dengan nilai 63,38. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing Instansi yang disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang terukur, acara diadakan di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin.
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK Perwakilan Kalsel	meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 yang merupakan prestasi ketiga secara berturut-turut menerima opini WTP
3.	Bakti Koperasi dan UKM	Menteri Koperasi dan UKM	pada peringatan Hari Koperasi ke-71 penghargaan ini diberikan karena Walikota Banjarbaru sangat peduli terhadap perkembangan koperasi dan melalui berbagai kegiatan untuk membantu promosi dan pemasaran produk UMKM di Kota Banjarbaru
4.	Kota Layak Anak	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	pertama kalinya Kota Banjarbaru dinobatkan sebagai Kota Layak Anak yang diterima Walikota Banjarbaru. Penghargaan ini dimaksudkan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the rights of the child</i>) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan investasi dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk memenuhi hak-hak anak pada suatu wilayah.

5	Manggala Karya Kencana	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	penghargaan ini diberikan kepada Walikota Banjarbaru dan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru sebagai tokoh yang telah menunjukkan program dan karya yang menonjol dalam pengembangan inovasi dan sistem yang bermanfaat bagi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6	Nata Mukti Nindya	ICBS dan Kementrian Koperasi UKM RI	Kota Banjarbaru mendapatkan Kategori tertinggi untuk kota yang mampu meningkatkan daya saing UKM secara keseluruhan
7.	Anugerah Pandu Negeri	Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia	untuk kedua kali Pemerintah Kota Banjarbaru menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri Kategori Kota dengang Kinerja dan Tata Kelola yang Baik dari Institute For Public Governance (IIPG).
8.	Pakarti Utama I Nasional	Tim Penggerak PKK Pusat	TP PKK Kota Banjarbaru menerima penghargaan Pakarti Utama I Nasional Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 46 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018
9.	Nasional Procurement Award	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	LPSE Kota Banjarbaru menerima Nasional Procurement Award Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah dan menunjukkan LPSE Kota Banjarbaru sebagai lembaga yang berintegritas, profesional dan independen.

10.	Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	penghargaan diberikan oleh Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) pada Rapat Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR
11.	Pendukung KUR Terbaik	Menko Perekonomian	Pemerintah Kota Banjarbaru dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Pendukung KUR terbaik Tahun 2018 di Luar pulau Jawa. Penghargaan diserahkan oleh Menko Perekonomian RI.
12.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Ombudsman RI	penghargaan diberikan atas kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018. Kota Banjarbaru masuk pada zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi Atas Pelayanan Publik dengan nilai 92,09.
13.	Anugerah Paharita Ekapraya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	penghargaan ini sebagai bentuk komitmen, kepedulian dan karakter Banjarbaru yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14.	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia	5 Sekolah penerima penghargaan yaitu SDN 3 Palam, SDN 3 Sungai Besar, SDN 3 Syamsudin Noor, SDN 5 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Paikat.
15.	Penghargaan Adiwiyata Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia	10 Sekolah penerima penghargaan yaitu SDN 1 Palam, SDN 4 Loktabat Utara, SDN 1 Guntung Payung, SDN 1 LU Barat, SDN 1 Mentaos, SDN 3 Komet, SDN 4 Komet, SDN 4 Sungai Besar, SDN 2 Komet, SMPN 2 Banjarbaru.

16.	Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Banjarbaru kembali meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kategori Kota Sedang yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI
-----	----------------	--	--